



**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGELUARAN  
PEMERINTAH PADA SEKTOR KESEHATAN DAN  
SEKTOR PENDIDIKAN TERHADAP INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA  
DI JAWA TIMUR**

**SKRIPSI**

Oleh  
**Irna Trifani**  
**NIM 110810101059**

**ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER  
2015**



**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGELUARAN  
PEMERINTAH PADA SEKTOR KESEHATAN DAN  
SEKTOR PENDIDIKAN TERHADAP INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA  
DI JAWA TIMUR**

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1)  
dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

**Irna Trifani  
NIM 110810101059**

**ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER  
2015**

**PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Allah SWT yang tidak terhingga atas terselesaikannya skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Mujiono dan Ibunda Paijah tercinta, yang telah mendoakan dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini;
2. Guru-guru sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

**MOTTO**

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Terjemahan QS. Al-Baqarah: 153)

“Betapa ringan langkah kita jika diawali doa dan senyuman karena itu menggambarkan ketulusan hati yang kuat dalam menghadapi banyak hal”

(Mario Teguh)

“Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena lebih suka bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi”.

(Ernest Newman)

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irna Trifani

NIM : 110810101059

Jurusan : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **"Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Pada sektor kesehatan dan pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur"** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, April 2015

Yang menyatakan

Irna Trifani  
NIM 110810101059

**SKRIPSI**

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGELUARAN  
PEMERINTAH PADA SEKTOR KESEHATAN DAN  
SEKTOR PENDIDIKAN TERHADAP INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA  
DI JAWA TIMUR**

**Irna Trifani  
NIM 110810101059**

**Pembimbing**

**Dosen Pembimbing I :Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si**

**Dosen Pembimbing II :Drs. Sunlip Wibisono, M.kes**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER  
2015**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI,  
PENGELUARAN PMERINTAH PADA SEKTOR  
KESEHATAN DAN SEKTOR PENDIDIKAN TERHADAP  
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI JAWA TIMUR  
TAHUN 2001-2013

Nama Mahasiswa : Irna Trifani

Nim : 110810101059

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia

Tanggal Persetujuan : 15 April 2015

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Moehammad Fathorrazi M.Si

NIP.19630614 199002 1 001

Dr. Sunlip Wibisono, M.Kes

NIP. 19581206 198603 1 003

Mengetahui,  
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes

NIP. 19641108 198902 2 001

**PENGESAHAN**

**Judul Skripsi**

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGELUARAN PEMERINTAH PADA  
SEKTOR KESEHATAN DAN SEKTOR PENDIDIKAN TERHADAP INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA DI JAWA TIMUR**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Irna Trifani

NIM : 110810101059

Jurusan : Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

28 Mei 2015

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Prof.Dr.Mohammad Saleh M.Sc (.....)  
NIP.195608311984031002
2. Sekretaris : Siswoyo Hadi Santoso S.E,M.Si (.....)  
NIP.196807151993031001
3. Anggota : Dr.Regina Niken Wilantari S.E.,M.Si (.....)  
NIP.197409132001122001
- 4.Pembimbing 1 : Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si (.....)  
NIP.196306141990021001
- 5.Pembimbing 2 : Dr. Sunlip Wibisono, M.Kes (.....)  
NIP. 19581206 198603 1 003

Mengetahui/Menyetujui  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi Dekan,

Foto 4 X 6

warna

Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si  
NIP.19630614 199002 1 001

*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Kesehatan Dan Sektor Pendidikan Terhadap Indek Pembangunan Manusia Di Jawa Timur*

Irna Trifani

Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi,  
Universitas Jember

## ABSTRAK

Jenis penelitian ini adalah *explanatory* yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan dan sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data *time series* tahun 2001-2013 dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Uji hipotesis menggunakan pengujian parsial (uji t), simultan (uji F), dan koefisien determinasi ( $R^2$ ). Uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Dari hasil analisis data secara parsial menunjukkan pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan dan sektor pendidikan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dengan tingkat kepercayaan 95%. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Secara simultan hasil analisis data menunjukkan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan dan pendidikan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur. Dan pada asumsi klasik dinyatakan tidak ada masalah pada ujnormalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Kesehatan Dan Sektor Pendidikan Dan Indeks Pembangunan Manusia.

*Effect of Economic Growth , Government Spending And  
In Health Sector Education Sector Against Human  
Development Index in East Java*

Irna trifani

Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan , Fakultas Ekonomi,  
Universitas Jember

**ABSTRACT**

*This research is explanatory aimed to determine the effect of economic growth, government spending on health and education sectors of the human development index in East Java. The data used in this study are secondary data from the 2001-2013 time series data using multiple linear regression analysis. Test the hypothesis using partial test (t test), simultaneous (F test), and the coefficient of determination (R<sup>2</sup>). Test using the classical assumption of normality test, multicollinearity, heteroscedasticity, and autocorrelation. From the analysis of partial data show the effect of government spending on health and education sectors have a significant effect on the human development index at 95% confidence level. Economic growth does not significantly influence the human development index. Simultaneously, the results of the analysis of the data showed economic growth, government spending on health and education sectors jointly significant effect on the human development index in East Java. And the classical assumptions stated no problem at ujinormalitas, multicollinearity, heteroscedasticity and autocorrelation.*

*Keywords: Economic Growth, Government Spending On Health Sector and Sector Education and Human Development Index*

**RINGKASAN**

**Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Kesehatan Dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Timur;** Irna Trifani; 110810101059; 2015; Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Pembangunan merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan hidup suatu Negara. Menciptakan pembangunan yang berkesinambungan adalah hal penting yang harus dilakukan oleh suatu Negara yang bertujuan menciptakan kondisi masyarakat yang dapat menikmati lingkungan yang dapat menunjang dan menjalankan kehidupan yang produktif. Pembangunan manusia adalah suatu proses perluasan pilihan bagi penduduk untuk membangun hidupnya yang dianggap berharga. Beberapa esensial dalam pembangunan manusia adalah agar manusia dapat merasakan kehidupan yang panjang dan sehat, berpengetahuan dan mempunyai akses terhadap sumber-sumber yang diperlukan untuk hidup layak. (UNDP, 2009). Menurut Todaro Konsep pembangunan manusia dalam pengertian diatas adalah jauh lebih luas daripada teori pembangunan ekonomi yang konvensional, termasuk model pertumbuhan ekonomi. Pembangunan SDM, pendekatan kesejahteraan, dan pendekatan kebutuhan dasar manusia. Pembangunan pada awalnya hanya diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai wujud dari kesejahteraan penduduk yang tinggi khususnya di Negara sedang berkembang. Arah dan konsep pembangunan diarahkan pada tujuan pemerataan sebagaimana konsep redistribusi pertumbuhan yang menitikberatkan pada mekanisme ekonomi, sosial, dan institusional demi meningkatkan standar hidup masyarakat. Dalam salah satu publikasi resminya, yakni *World Development Report*, yang terbit tahun 1991 bank Dunia melontarkan pernyataan yang tegas (Todaro dan Smith, 2006:22).

Indek Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit berdasarkan tiga indikator yaitu : angka harapan hidup, angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah serta kemampuan daya beli. Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup. Dilihat dari tiga indikator komposit IPM melek huruf merupakan kunci dasar yang paling esensial diantara indikator pembangunan manusia lainnya. Pentingnya indikator ini untuk mengukur dimensi pengetahuan. Pendidikan merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan suatu negara ataupun daerah.

Berdasarkan analisis regresi linier berganda (*Multiple Regression Model*) dengan menggunakan uji asumsi klasik (*Ordinary Least Square*) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan, hal ini berarti bahwa tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi tidak serta merta akan meningkatkan indeks pembangunan manusia di Jawa Timur. Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Peningkatan indeks pembangunan manusia di Jawa Timur dapat dilakukan melalui kebijakan yang mendorong peningkatan pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan. Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan berpengaruh signifikan secara negatif. Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan tidak berpengaruh dan tidak berkontribusi terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di Jawa Timur

## PRAKATA

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Kesehatan dan Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa motivasi, nasehat, saran maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Moehammad Fathorrazi, SE, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember dan Selaku Dosen Pembimbing 1 yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan pengarahan dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kesabaran dalam membantu menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Sunlip Wibisono M.kes., selaku Dosen Pembimbing II yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan pengarahan dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kesabaran dalam membantu menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Dr. Sebastiana Viphindartini M.kes selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
4. Ibu Dra. Nanik Istiyani M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik terimakasih atas bantuan selama ini telah membimbing penulis dalam menentukan mata kuliah;

5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Jember serta Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Perpustakaan Pusat;
6. Ibunda Paijah dan Ayahanda Mujiono, terima kasih yang tak terhingga ananda ucapkan atas doa, dukungan, kasih sayang, kerja keras, kesabaran dan pengorbanan selama ini;
7. Kakakku tercinta Rani, Alim, Rina, David dan Budi beserta seluruh keluarga besarku, terimakasih atas doa, dan kasih sayang, serta dukungan yang tanpa henti;
8. Seluruh sahabatku diah, icha ida, mbak luhlul, mbak imeh dan teman-teman kosan jl. Kalimantan 43 terima kasih atas segala motivasi, diskusi, *sharing* bareng dan bersama-sama berjuang dalam suka duka mengerjakan skripsi selama ini;
9. Segenap Keluarga Kelompok Studi Konsentrasi ESDM dan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan atas segala motivasi, diskusi, *sharing* bareng dan bersama-sama berjuang dalam suka duka mengerjakan skripsi selama ini
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhir kata tidak ada sesuatu yang sempurna didunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya. Amiin.

Jember, April 2015

Penyusun

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	vi
<b>HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACK</b> .....	x
<b>RINGKASAN</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xviii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xx
<b>BAB 1.PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB 2.TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
2.1 Landasan Teori .....	9
2.1.1 Pembangunan Manusia .....	9
2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia .....	10
2.1.3 Teori Pengeluaran Pemerintah .....	14
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi .....	22

2.1.5 Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah(Pendidikan dan Kesehatan) dengan Indeks Pembangunan Manusia(IPM) .....	25
2.1.6 Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dengan IPM .....	27
2.2 Penelitian Sebelumnya .....	29
2.3 Kerangka Konseptual .....	32
2.4 Hipotesis Penelitian .....	34
<b>BAB 3.METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	35
3.2 Unit Analisis Data .....	35
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	35
3.4 Metode Analisis Data.....	36
3.4.1 Analisis Regresi Berganda.....	36
3.4.2 Uji Statistik.....	36
3.4.3 Uji Asumsi Klasik.....	39
3.5 Definisi Variabel Operasional .....	42
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
4.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Timur .....	43
4.1.1 Kondisi dan Letak geografis .....	43
4.1.2 Keadaan Penduduk Jawa Timur.....	45
4.1.3 Keadaan Perekonomian di Jawa Timur .....	47
4.1.4 Pembangunan Manusia di Jawa Timur .....	48
4.2 Gambaran Objek Penelitian .....	56
4.2.1 Gambaran Umum Pertumbuhan Ekonomi(PDRB).....	56
4.2.2 Gambaran Umum Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Kesehatan dan Sektor Pendidikan .....	58
4.3 Hasil Analisis Data .....	59

4.3.1 Analisis Regresi Linier .....	59
4.3.2 Uji Statistik .....	61
4.3.3 Uji Asumsi Klasik .....	64
4.4 Hasil dan Pembahasan .....	67
<b>BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>73</b>
5.1 Kesimpulan .....	73
5.2 Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>78</b>

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
1.1 Perkembangan Angka Melek Huruf Provinsi Jawa Timur 2009-2013 .....	2
1.2 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur 2005-2013 .....	3
1.3 Angka Harapan Hidup menurut kab/kota di Jawa Timur 2009-2012 .....	4
1.4 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur 2009-2013 .....	6
2.1 Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM .....	14
2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	31
4.1 Distribusi Penduduk menurut kab/kota di Jawa Timur 2010.....	46
4.2 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur .....	48
4.3 Angka Kematian Bayi dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Jawa Timur tahun 2009-2013 .....	56
4.4 Rata-Rata Konsumsi per Kapita Menurut Kelompok Konsumsi dan Status Wilayah di Jawa tahun 2009-2013 .....	55
4.5 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Jawa Timur 2001-2013.....	50
4.6 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Kesehatan dan Sektor Pendidikan Jawa Timur tahun 2001-2013 .....	52
4.7 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda .....	53
4.8 Hasil Uji t .....	56
4.9 Hasil Uji Multikolinearitas .....	58
4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	60
4.11 Hasil Uji Autokorelasi .....	60

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
2.1 Kerangka Konseptual .....	33
4.1 Peta Jawa Timur .....	43
4.2 Indeks Pembangunan Manusia(IPM) Jawa Timur 2009-2013 .....	49
4.3 Rata-Rata Lama Sekolah di Jawa timur 2009-2013 .....	51
4.4 Uji Normalitas .....	64

**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
A. Hasil Analisis Regresi .....	78
B. Uji Multikolinearitas .....	79
C. Uji Heteroskedastisitas .....	81
D. Uji Autokorelasi .....	82
E. Uji Normalitas .....	83
F. Analisis Data .....	84

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan hidup suatu Negara. Menciptakan pembangunan yang berkesinambungan adalah hal penting yang harus dilakukan oleh suatu Negara yang bertujuan menciptakan kondisi masyarakat yang dapat menikmati lingkungan yang dapat menunjang dan menjalankan kehidupan yang produktif. Sesuai dengan perkembangan paradigma pembangunan ekonomi, maka telah terjadi tolak ukur keberhasilan perkembangan ekonomi dari pendekatan ekonomi (*growth*) menjadi pendekatan pembangunan manusia. Fungsi dasar dari kegiatan ekonomi pada dasarnya adalah untuk menyediakan sebanyak mungkin kebutuhan dasar masyarakat, atas dasar itulah syarat penentu keberhasilan ekonomi adalah membaiknya kualitas kehidupan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) secara fisik dan mental mengandung makna peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan .

Kapasitas dasar yang sekaligus merupakan tiga nilai pokok keberhasilan pembangunan ekonomi adalah kecukupan (*sustenance*), jati diri (*selfsteem*), serta kebebasan (*freedom*), (Todaro dan Smith, 2006:27). Pembangunan manusia menjadi penting dan perlu mendapat perhatian sebab pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu dapat memecahkan persoalan kesejahteraan seperti kemiskinan dan taraf hidup masyarakat secara luas , sehingga keberhasilan pembangunan suatu negara seringkali dilihat dari pencapaian kualitas sumber daya manusia. Investasi pada modal manusia diharapkan akan berpengaruh positif terhadap kinerja perekonomian yang salah satunya dapat diamati dari aspek tingkat pendidikan dan kesehatan. Investasi modal manusia ini yang mencakup pengembangan Sumber Daya Manusia membutuhkan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran dalam mendorong peningkatan kualitas SDM. Menurut Mankiw (2008:48) Pengembangan sumber daya manusia dapat

dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia. Modal manusia yang termasuk kecakapan dibentuk mulai dari taman kanak, sekolah dan perguruan tinggi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit berdasarkan tiga indikator yaitu : angka harapan hidup, angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah serta kemampuan daya beli. Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup.

Dilihat dari tiga indikator komposit IPM melek huruf merupakan kunci dasar yang paling esensial diantara indikator pembangunan manusia lainnya. Pentingnya indikator ini untuk mengukur dimensi pengetahuan. Pendidikan merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan suatu negara ataupun daerah. Provinsi Jawa Timur merupakan kota pendidikan dimana terdapat banyak perguruan dan sekolah yang cukup diminati oleh masyarakat Indonesia. Jawa Timur juga penyumbang terbesar buta huruf nasional. Berdasarkan data BPS sasaran pencapaian indikator melek huruf usia 15 tahun keatas menjadi sasaran global dan nasional. Berdasarkan tabel 1.1 angka melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas di Jawa Timur, selama kurun waktu 2009-2012 mengalami peningkatan dari 87,80 di tahun 2009 dan mejadi 88,34 persen di tahun 2010 dan 88,79 persen di tahun 2011, pada tahun 2012 89,00 persen (BPS Jawa Timur, 2013)

**Tabel 1.1 Perkembangan Angka Melek Huruf Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2012**

No	Uraian	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	24,492,836	24,984,639	25,077,871	25,773,409
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	27.896,169	28.282,363	28.244,026	28.963,661
3	Angka melek huruf (persen)	87,80	88,34	88,79	89,00
4	Angka buta huruf (persen)	12,20	11,66	11,21	11,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2013

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Timur , secara umum IPM Provinsi Jawa Timur cenderung naik setiap tahunnya, dari tahun 2005 sebesar 62,22 hingga tahun 2011 72,18. Akan tetapi Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur masih dibawah Indeks Pembangunan Manusia nasional. Hal ini dapat dilihat bahwa angka IPM jawa timur pada tahun 2011 sebesar 72,18 , sedangkan IPM nasional sebesar 72,77.

**Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi jawa Timur Periode 2005-2011(Dalam persen)**

No	Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
1	2005	62,22%
2	2006	68,4%
3	2007	69,2%
4	2008	70,38%
5	2009	71,06%
6	2010	71,62%
7	2011	72,18%

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2012*

Dalam pembangunan manusia indeks kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara. Dengan meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada akhirnya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat memperpanjang usia harapan hidup masyarakat provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan BPS Provinsi Jawa Timur dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh BPS RI dengan metode tidak langsung, rata-rata Angka Harapan Hidup di Jawa Timur selama empat tahun terakhir 2009-2012 menunjukkan peningkatan. Pada tahun

2009 69,15 dan meningkat menjadi 70,09 pada tahun 2012. Pada umumnya kabupaten-kabupaten tapal kuda seperti Sampang, Probolinggo, Bondowoso, Jember, Sumenep, Bangkalan, Pamekasan, Situbondo dan Pasuruan memiliki usia harapan hidup yang terendah dibandingkan dengan daerah “kulonan” (Jawa Timur bagian barat). Angka harapan hidup pada wilayah “tapal kuda” berkisar pada angka 64 hingga 66 tahun untuk perempuan dan 60 hingga 63 untuk laki-laki. Wilayah yang memiliki usia harapan hidup cukup tinggi adalah kabupaten Tulungagung, kota Mojokerto, kabupaten Pacitan, kota Blitar dengan 74-75 tahun untuk perempuan dan 71,56 tahun untuk laki-laki. (BPS Jawa Timur, 2012)

**Tabel 1.3 Angka Harapan Hidup (AHH) menurut Kabupaten/ Kota di Jawa Timur Tahun 2009-2012**

Kode	Kabupaten/kota	Tahun			
		2009	2010	2011	2012
3501	Pacitan	71,04	71,26	71,48	71,69
3502	Ponorogo	69,62	69,94	70,24	70,55
3503	Trenggalek	71,36	71,62	71,87	72,13
3504	Tulungagung	71,23	71,48	71,72	71,95
3505	Blitar	70,66	70,88	71,09	71,30
3506	Kediri	69,42	69,66	69,90	70,15
3507	Malang	68,70	68,96	69,23	69,50
3508	Lumajang	66,87	67,17	67,46	67,75
3509	Jember	62,66	62,84	63,03	63,21
3510	Bangyuwangi	67,18	67,58	67,98	68,38
3511	Bondowoso	62,92	63,23	63,54	63,85
3512	Situbondo	63,02	63,19	63,36	63,52
3513	Probolinggo	60,85	61,13	61,42	61,70
3514	Pasuruan	63,70	64,01	64,31	64,61
3515	Sidoarjo	70,31	70,55	70,79	71,03
3516	Mojokerto	69,97	70,19	70,42	70,64
3517	Jombang	69,99	70,09	70,18	70,28
3518	Nganjuk	68,67	68,89	69,11	69,33
3519	Madiun	68,72	68,90	69,07	69,25
3520	Magetan	70,93	71,17	71,41	71,66
3521	Ngawi	69,58	69,91	70,24	70,57
3522	Bojonegoro	67,01	67,15	67,28	67,42
3523	Tuban	67,56	67,78	68,00	68,21
3524	Lamongan	68,02	68,20	68,37	68,55
3525	Gresik	70,73	70,98	71,22	71,47

Dilanjutkan

Lanjutan

3526	Bangkalan	63,16	63,32	63,48	63,65
3527	Sampang	62,34	63,00	63,49	63,98
3528	Pamekasan	63,59	63,99	64,39	64,79
3529	Sumenep	64,53	64,71	64,89	65,07
3571	Kota Kediri	70,18	70,42	70,64	70,86
3572	Kota Blitar	71,95	72,23	72,51	72,80
3573	Kota Malang	69,96	70,32	70,68	70,97
3574	Kota Probolinggo	69,83	70,17	70,52	70,86
3575	Kota Pasuruan	66,33	66,37	66,41	66,46
3576	Kota Mojokerto	71,35	71,56	71,78	72,00
3577	Kota Madiun	70,81	71,01	71,22	71,42
3578	Kota Surabaya	70,71	71,01	71,27	71,53
3579	Kota Batu	69,16	69,44	69,72	70,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2013

Dalam sumbangsihnya terhadap PDB nasional, pulau Jawa merupakan penyumbang terbesar jika dibandingkan pulau lainnya dengan perincian provinsi-provinsi di Jawa yang memberikan sumbangan terbesar adalah DKI Jakarta 16,8 persen, Jawa Timur 15,00 persen, Jawa Barat 13,9 persen dan Jawa Tengah 8,6 persen. Berdasarkan pemaparan diatas bahwa Jawa Timur merupakan penyumbang terbesar kedua setelah DKI Jakarta. Maka dapat dikatakan Jawa Timur sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun provinsi Jawa Timur penyumbang kedua terbesar PDB nasional tetapi IPM Jawa Timur berada terbawah diantara di pulau Jawa. (BPS Jawa Timur, 2012)

Pertumbuhan ekonomi harus dikombinasikan dengan pemerataan hasil-hasilnya. Pemerataan kesempatan harus tersedia baik, semua orang perempuan maupun laki-laki harus diberdayakan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan meningkatkan pendidikan.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selama kurun waktu 2009-2013. Pada tahun 2009 PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 686,85 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp. 778,57 triliun pada tahun 2010 Rp. 884,50 triliun pada tahun 2011, Rp. 1.001,72 triliun pada tahun 2012 dan Rp. 1.136,33 triliun pada tahun 2013. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) Jawa Timur tahun 2009 meningkat dari Rp. 320,86 triliun menjadi Rp. 393,67 triliun pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 mencapai Rp. 419,43 triliun. Berdasarkan tabel 1.4 dapat dilihat bahwa pada tahun 2009 perekonomian Jawa Timur mampu tumbuh 5,01 persen, kemudian tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 masing-masing mengalami percepatan sebesar 6,68 persen, 7,22 persen dan 7,27 persen, akan tetapi mengalami perlambatan menjadi 6,55 persen pada tahun 2013. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selama kurun waktu tersebut lebih cepat dari rata-rata nasional(BPS Jawa Timur ,2013)

**Tabel 1.4 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur tahun 2009-2013**

Keterangan	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB ADHB(miliar Rupiah)	686,848	778,566	884,503	1.001,72 1	1.136,330
PDRB ADHK 2000( miliar rupiah)	320,861	342,281	366,984	393,666	419,430
Pertumbuhan Ekonomi(%)	5,01	6,68	7,27	7,27	6,55
Pertumbuhan Ekonomi Nasional (%)	4,55	6,10	6,23	6,23	5,78

*Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2013*

Pemerintah dalam hal ini memiliki berbagai peran dalam perekonomian. Terdapat tiga peran utama yang harus dapat dilaksanakan dengan baik dalam perekonomian oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam perekonomian dalam Mangkoesobroto (2001:25) yaitu: (1) Peran Stabilisasi, Pemerintah lebih berperan sebagai stabilisator untuk menjaga agar perekonomian berjalan normal. Menjaga agar permasalahan yang terjadi pada satu sektor perekonomian tidak merembet ke sektor lain. (2) Peran Distribusi, Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi dilaksanakan secara efisien agar kekayaan suatu negara dapat

terdistribusi secara baik dalam masyarakat. (3) Peran Alokasi, Pada dasarnya sumber daya yang dimiliki suatu negara adalah terbatas. Pemerintah harus menentukan seberapa besar dari sumber daya yang dimiliki akan dipergunakan untuk memproduksi barang-barang publik, dan seberapa besar akan digunakan untuk memproduksi barang-barang individu. Pemerintah harus menentukan dari barang-barang publik yang diperlukan warganya, seberapa besar yang harus disediakan oleh pemerintah, dan seberapa besar yang dapat disediakan oleh rumah tangga perusahaan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Kesehatan Dan Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Timur”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bertitik tolak ukur pada permasalahan tersebut maka diketahui bahwa Provinsi Jawa Timur Indeks Pembangunan Manusia paling rendah diantara provinsi yang ada dipulau Jawa. Serta alokasi dana APBD untuk bidang pendidikan dan kesehatan yang tiap tahunnya meningkat tidak sebanding dengan kenaikan pembangunan manusia yang tercermin dari IPM. Hal ini tercermin dari penduduk miskin yang relatif cukup tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain khususnya dipulau jawa. Berdasarkan hal tersebut maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur?
2. Seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur?
3. Seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks pembangunan Manusia di Jawa Timur?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang akan diteliti maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui :

1. Pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan terhadap pembangunan manusia di Jawa Timur.
2. Pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan terhadap pembangunan manusia di Jawa Timur.
3. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia di Jawa Timur.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak khususnya sebagai berikut :

1. Sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam memecahkan masalah menyangkut pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan manusia di Jawa timur .
2. Sebagai bahan informasi kepada pihak lain khususnya bagi peneliti yang sejenis yang membutuhkan informasi dengan tipe penelitian yang sejenis.
3. Sebagai ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia adalah suatu proses perluasan pilihan bagi penduduk untuk membangun hidupnya yang dianggap berharga. Beberapa esensial dalam pembangunan manusia adalah agar manusia dapat merasakan kehidupan yang panjang dan sehat, berpengetahuan dan mempunyai akses terhadap suber-sumber yang diperlukan untuk hidup layak.( UNDP,2009).

Menurut Todaro Konsep pembangunan manusia dalam pengertian diatas adalah jauh lebih luas daripada teori pembangunan ekonomi yang konvensional, termasuk model pertumbuhan ekonomi. Pembangunan SDM,pendekatan kesejahteraan, dan pendekatan kebutuhan dasar manusia. Pembangunan pada awalnya hanya diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai wujud dari kesejahteraan penduduk yang tinggi khususnya di Negara sedang berkembang. Arah dan konsep pembangunan diarahkan pada tujuan pemerataan sebagaimana konsep redistribusi pertumbuhan yang menitikberatkan pada mekanisme ekonomi, sosial, dan institusional demi meningkatkan standar hidup masyarakat. Dalam salah satu publikasi resminya , yakni *World Development Report*, yang terbit tahun 1991 bank Dunia melontarkan pernyataan yang tegas(Todaro dan Smith,2006:22).

Sesuai dengan konsep pembangunan manusia pendapatan hanyalah salah satu pilihan manusia walupun termasuk yang terpenting. Tujuan pembangunan manusia ialah memperluas pilihan bukan hanya pendapatan. Sebagai contoh bahwa pendapatan dapat digunakan untuk membeli obat yang esensial, atau narkotika. Oleh karena itu, pendapatan hanyalah media bukan tujuan akhir karena pendapatan dapat digunakan untuk tujuan yang buruk bagi kehidupan manusia (Christian,2011:30)

Berdasarkan pernyataan Bank Dunia tersebut maka dapat dikatakan bahwa pembangunan merupakan proses multidimensional yang memiliki cakupan yang luas bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi juga mencakup sosial, sikap masyarakat dengan tetap memacu pertumbuhan ekonomi. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga tujuan utama dari pembangunan (Todaro dan Smith ,2006:28) yaitu :

1. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan pokok.
2. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya peningkatan berupa pendapatan tetapi juga peningkatan tersedianya lapangan pekerjaan, perbaikan kualitas kesehatan dan pendidikan, yang semuanya menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan.
3. Perluasan pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari ketergantungan terhadap orang atau negara-negara lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

Pembangunan manusia merupakan hal yang penting terutama bagi sebagian negara khususnya negara yang sedang berkembang hal ini disebabkan oleh karena banyak negara dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi namun gagal dalam menghadapi masalah kesenjangan sosial dan meningkatnya kemiskinan selain itu pembangunan manusia sebenarnya merupakan investasi tidak langsung terhadap pencapaian tujuan perekonomian nasional.

### **2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia**

Definisi indeks pembangunan manusia menurut UNDP(*United Nation Development Program*) adalah pengukuran perbandingan dari indikator IPM yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf dan standart hidup dan indikator untuk mengukur kualitas(derajat perkembangan manusia) dari hasil pembanguna ekonomi di seluruh negara. Indeks pembangunan manusia juga digunakan untuk

mengklasifikasikan apakah negara masuk dalam negara maju, berkembang atau terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Dari definisi yang diberikan UNDP tersebut mencerminkan bahwa manusia dalam suatu wilayah selayaknya memiliki dan diberikan pilihan-pilihan yang luas dan dibutuhkan dukungan dari pemerintah guna memberikan sarana bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan dan mengambil keputusan sesuai dengan pilihan yang diambil. Salah satu yang paling menentukan dalam suksesnya pembangunan manusia adalah pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan, sehingga dua sektor tersebut menjadi prioritas utama pemerintah guna mewujudkan pembangunan manusia yang akhirnya menjadi input dalam proses pembangunan di berbagai sektor (Christian, 2011:34)

Indeks ini pada 1990 dikembangkan oleh pemenang Nobel India Amartya Sen dan Mahbub ul Haq seorang ekonom Pakistan dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics. Sejak itu dipakai oleh program pembangunan PBB pada laporan HDI tahunannya. Indeks ini lebih fokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan dan indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya (Devianti, 2012:3)

IPM mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen tersebut adalah peluang hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) dan hidup layak (*living standards*). Peluang hidup dihitung berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir, pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas dan hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang didasarkan pada paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85

tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak. Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, semakin dekat jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran itu.

IPM terdapat tiga komposisi indikator yang digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan manusia suatu negara, yaitu :

1. Tingkat kesehatan diukur harapan hidup saat lahir (tingkat kematian bayi).
2. Tingkat pendidikan diukur dengan jumlah penduduk yang melek huruf atau tingkat pendidikan yang telah dicapai atau lamanya pendidikan seorang penduduk.
3. Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per tahun

## 1. Komponen-Komponen IPM

### 1) Indeks Harapan Hidup

Hal ini menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan yang dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan memasukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian per tahun variabel  $e_0$  diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat. Sehubungan dengan sulitnya mendapatkan informasi orang yang meninggal pada kurun waktu tertentu, maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan metode tidak langsung (metode Brass, varian Trussel). Data dasar yang dibutuhkan dalam metode ini adalah rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin. Secara singkat, proses penghitungan angka harapan hidup ini disediakan oleh program Mortpak. Untuk mendapatkan Indeks Harapan Hidup dengan cara menstandartkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya.

### 2) Indeks Pendidikan

Perhitungan indeks pendidikan mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf (Lit) dan rata-rata lama sekolah (MYS) Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan

kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya.

Angka melek huruf diolah dari variabel kemampuan membaca dan menulis, sedangkan rata-rata lama sekolah dihitung menggunakan tiga variabel secara simultan yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani, dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan (cerminan angka Lit), dimana Lit merupakan proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok penduduk secara keseluruhan. Sedangkan cerminan angka MYS merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk.

### 3) Indek Hidup Layak

Untuk mengukur hidup layak ( daya beli), UNDP menggunakan indikator yang dikenal dengan real perkapita GDP adjusted. Untuk perhitungan IPM sub nasional (provinsi atau kabupaten/kota) tidak memakai PDRB per kapita karena PDRB per kapita hanya mengukur produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat yang merupakan *concern* IPM. Untuk mengukur daya beli penduduk antar provinsi di Indonesia, BPS menggunakan data rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan telah distandarkan agar bisa dibandingkan antar daerah dan antar waktu yang disesuaikan dengan indeks PPP (*Purchasing Power Parity*)

## 2. Tahapan Perhitungan IPM

Tahapan perhitungan IPM dapat dibedakan menjadi dua tahap yaitu sebagai berikut :

1) Tahapan pertama penghitungan IPM adalah menghitung indeks masing-masing komponen IPM ( $e^{\circ}$ , pengetahuan, dan standar hidup layak) dengan hubungan matematis sebagai berikut:

Indeks ( $X_i$ ) =  $(X_i - X_{\min}) / (X_{\max} - X_{\min})$   
 $X_i$  = indikator komponen IPM ke- $i$  ( $i = 1,2,3$ )  
 $X_{\max}$  = nilai maksimum  $X_i$   
 $X_{\min}$  = nilai minimum  $X_i$

Persamaan di atas akan menghasilkan nilai  $0 \leq X_i \leq 1$ , untuk mempermudah cara membaca skala dinyatakan dalam 100 persen sehingga interval nilai menjadi  $0 \leq X_i \leq 100$ .

- 2) Tahapan kedua penghitungan IPM adalah menghitung rata-rata sederhana dari masing-masing indeks  $X_i$  dengan hubungan matematis:

$$\begin{aligned} \text{Indeks Pembangunan Manusia (IPM)} &= 1/3 X_i \\ &= 1/3 (X_1 + X_2 + X_3) \end{aligned}$$

Dimana :

$X_1$  = indeks angka harapan hidup

$X_2$  =  $2/3$  (indeks melek huruf) +  $1/3$  (indeks rata-rata lama sekolah)

$X_3$  = indeks konsumsi per kapita yang disesuaikan

**Tabel. 2.1 Nilai maksimum dan minimum komponen IPM**

Indikator	Nilai maksimum	Nilai minimum
Angka Harapan Hidup (e0)	85,0	25
Angka Melek Huruf (Lit)	100	0
Rata-rata Lama Sekolah (Mys)	15	0
Purchasing Power Parity (PPP)	737,720	360.00

Sumber : BPS,BAPPENAS,2004

### 2.1.3 Teori Pengeluaran Pemerintah

#### 1. Konsep Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah nilai dari pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran untuk gaji pegawai

pemerintahan dan pengeluaran untuk insfrastruktur dibuat untuk kepentingan masyarakat. Pembelian pemerintah untuk barang dan jasa dapat digolongkan menjadi dua golongan utama yaitu pengeluaran penggunaan pemerintah untuk konsumsi dan investasi pemerintah( Sukirno 2004: 268). Konsumsi pemerintah adalah pembelian barang dan jasa yang akan digunakan untuk membayar gaji pegawai, membeli alat-alat kantor dan untuk pengeluaran operasional pemerintah. Investasi pemerintah meliputi pengeluaran untuk pembangunan untuk sarana dan prasarana seperti jalan umum, sekolah, pemberian subsidi sekolah maupun kesehatan.

Pengeluaran konsumsi pemerintah di Indonesia tercermin dalam pengeluaran rutin sedangkan investasi pemerintah tercermin dalam pembangunan. Jumlah pengeluaran pemerintah yang akan dilakukan dalam suatu periode tertentu tergantung pada beberapa faktor antara lain( Christian,2011 : 49) :

- 1) Jumlah pajak diramalkan. Dalam penyusunan anggaran belanja pemerintah harus terlebih dahulu membuat proyeksi mengenai jumlah pajak yang akan diterima. Makin banyak jumlah poajak yang dikumpulkan maka makin banyak pula pembelanjaan pemrintah yang akan dilakukan.
- 2) Tujuan ekonomi yang ingin dicapai oleh pemerintah. Kegiatan pemerintah bertujuan untuk dapat mengatur perekonomian kearah yang lebih baik lagi. Kegiatan pemerintah tersebut mempunyai tujuan salah satunya sebagai berikut untuk mengurangi pengangguran, menurunkan tingkat inflasi, dan mempercepat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Untuk melakukan kegiatan tersebut maka pemerintah membutuhkan banyak dana yang lebih besar dari pendapatan yang diperoleh dari pajak. Untuk mengurangi pengangguran dan menarik minat swasta untuk berinvestasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi misalnya pemerintah perlu membiayai infrastruktur seperti irigasi, jalan raya, pelabuhan serta membangun sarana di bidang pendidikan dan kesehatan. Sering kali penerimaan yang berasal dari pajak tidak mencukupi untuk menutupi pembiayaan oleh karenanya pemerintah kadang kala terpaksa mencetak uang baru.

- 3) Stabilitas kondisi politik sebuah negara juga berpengaruh terhadap penyusunan anggaran belanja pemerintah. Seringkali masalah stabilitas politik berpengaruh terhadap stabilitas perekonomian contohnya dengan munculnya gangguan seperti adanya perang yang menyebabkan pengeluaran pemerintah menjadi meningkat untuk mengatasi dampak dari kekacauan stabilitas politik selain itu juga berpengaruh terhadap iklim investasi sehingga berdampak pada pengeluaran pemerintah.

## 2. Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah

Menurut Suparmoko (1994:78) pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari berbagai segi sehingga dapat dibedakan menjadi empat klasifikasi sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran pemerintah merupakan investasi untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang.
- 2) Pengeluaran pemerintah langsung memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
- 3) Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran yang akan datang.
- 4) Pengeluaran pemerintah merupakan sarana penyedia kesempatan kerja yang lebih banyak dan penyebaran daya beli yang lebih luas.

Oleh karena itu pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menjadi beberapa golongan yaitu sebagai berikut :

- 1) Pengeluaran yang *self liquidating* sebagian atau seluruhnya, artinya pengeluaran pemerintah yang mendapatkan timbal balik dari masyarakat yang menerima jasa atau barang yang bersangkutan.
- 2) Pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan-keuntungan yang ekonomis bagi masyarakat, dimana dengan naiknya tingkat penghasilan dan sasaran pajak yang lain dan pada akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah.
- 3) Pengeluaran yang tidak *self liquidating* maupun yang tidak produktif yaitu pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat.

- 4) Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan, misalnya untuk pembiayaan pertahanan atau perang meskipun pada saat pengeluaran terjadi kenaikan penerimaan.
- 5) Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang. Misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu.

Pengeluaran pemerintah juga dapat dibedakan menurut berbagai macam klasifikasi sebagai berikut, Suparmoko(1994:80) :

1. Perbedaan antara pengeluaran belanja rutin dengan pengeluaran belanja pembangunan
  - 1) Belanja rutin adalah belanja untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan pemerintah sehari-hari, seperti : belanja pegawai, belanja barang harian, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan.
  - 2) Belanja pembangunan, adalah pengeluaran untuk pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik-spiritual.
2. Perbedaan antara *current account* dengan *capital expenditure*
  - 1) *Current account* ( anggaran rutin), yaitu anggaran untuk penyelenggaraan pemerintah sehari-hari termasuk belanja pegawai dan belanja barang serta belanja pemeliharaan.
  - 2) *Capital expenditure* ( belanja pembangunan ) yaitu rencana untuk pembelian capital (tetap).
3. Perbedaan *obligatory expenditure* dengan *optional expenditure*, antara *real expenditure* dengan *transfer expenditure* dan antara *liquidated expenditure* dengan *cash expenditure*.
  - 1) *Obligatory Expenditure* (pengeluaran wajib) adalah pengeluaran yang bersifat wajib yang harus dilakukan agar efektivitas pelaksanaan dapat terselenggara dengan baik.
  - 2) *Optional Expenditure* (pengeluaran opsional) adalah pengeluaran yang dilakukan pada saat tiba-tiba dibutuhkan

- 3) *Real Expenditure* (pengeluaran nyata) adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa.
- 4) *Transfer Expenditure* adalah pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan mendapatkan barang dan jasa
- 5) *Liquidated Expenditure* adalah pengeluaran pemerintah yang sudah diajukan dan disetujui oleh DPR atau DPRD. Yang semula RAPBN/RAPBD setelah mendapat pengesahan menjadi APBN/APBD
- 6) *Cash Expenditure* adalah pengeluaran yang telah sungguh-sungguh dilaksanakan berupa pembayaran-pembayaran konkrit.

## 2. Teori Makro Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesobroto 1994 : 174)

Dasar teori pengeluaran pemerintah terdapat dalam keseimbangan pendapatan nasional sebagai berikut :

$$Y=C+I+G+(X-M)$$

Dimana:

Y = Pendapatan Nasional Sekaligus Penawaran Agregat

C = Konsumsi

I = Investasi

G = Pengeluaran Pemerintah

X-M = Ekspor-Impor

Dimana G merupakan pengeluaran pemerintah yang merupakan bentuk dari campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah maka akan menaikkan atau menurunkan pendapatan nasional. Pemerintah tidak hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya,

tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati dari kebijaksanaan tersebut. Pemerintah juga perlu menghindar agar peningjatan perannya dalam perekonomian justru tidak melemahkan kegiatan swasta ( Dumairy, 1997:161-164)

Pemerintah sebagai pemeran paling utama dalam setiap hajat hidup masyarakat indonesia perlu melakukan kajian yang mendalam dan berulang dalam setiap kebijakan yang akan diambil. Agar setiap output yang dihasilkan dan diharapkan dapat tepat sasaran dan memberikan pengaruh positif dan nyata terhadap masyarakat luas. Kebijakan yang tidak tepat sasaran melalui kebijakan alokasi dana tiap sektor yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas seharusnya perlu diberikan porsi lebih dalam alokasi anggaran pemerintah, kebijakan pemerintah menyangkut sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial adalah beberapa contoh diantaranya yang perlu diberikan perhatian lebih, hal ini dikarenakan pada sektor – sektor tersebutlah masyarakat dapat merasakan secara langsung dampak dari kebijakan pemerintah yang diambil. diberikan perhatian lebih, hal ini dikarenakan pada sektor – sektor tersebutlah masyarakat dapat merasakan secara langsung dampak dari kebijakan pemerintah yang diambil(Christin,2011:47)

Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut ( Boediono 1999 : 86)

- 1) Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa
- 2) Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. Perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung
- 3) Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Transfer payment bukan pembelian barang dan jasa oleh pemerintah dipasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi pemberian subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pemberian pensiunan, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis transfer payment mempunyai status dan pengaruh sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administratif keduanya berbeda.

### 3. Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan

Menurut Mahmudi (2007), pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang dimaksud dalam penyelenggara dalam pelayanan publik adalah instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Dalam (Widodo, 2011:28). Pelayanan publik yang harus diberikan kepada masyarakat dapat dibedakan menjadi dua kategori utama yaitu :

#### 1. Pelayanan Kebutuhan Dasar

Pelayanan kebutuhan dasar yang harus diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah yaitu meliputi kesehatan, pendidikan dasar dan bahan kebutuhan pokok.

##### 1) Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, oleh karena itu kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang dasar . perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Tingkat kesehatan masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan yang secara tidak langsung akan berpengaruh juga pada tingkat kemiskinan. Sementara itu tingkat kemiskinan akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan. Oleh karena itu kesehatan merupakan faktor utama kesejahteraan suatu masyarakat yang dimana menjadi perhatian utama pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah harus dapat menjamin hak masyarakat untuk sehat ( *right for health*) dengan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara adil, merata, memadai, terjangkau dan berkualitas.

##### 2) Pendidikan Dasar

Pendidikan merupakan bentuk suatu investasi sumber daya manusia sama halnya dengan kesehatan. Tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap tingkat pembangunan dimasyarakat. Karena pendidikan merupakan salah satu komponen utama dalam lingkaran setan kemiskinan yang dimana apabila tingkat kemiskinan rendah

maka pembangunan manusia akan meningkat. Salah satu cara untuk meningkatkan pembangunan manusia dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan memperbaiki sistemnya. Dan menjalankan program pemerintah yang wajib belajar 12 tahun .pemerintah hendak menjamin bahwa semua anak dapat bersekolah , sehingga diperlukan alokasi anggaran pendidikan yang besar. Dalam peemenuhan anggaran tersebut amanat amandemen UUD 1945 telah mensyaratkan alokasi anggaran pendidikan minimal sebesar 20 persen dari total anggaran.

### 3) Bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat

Dalam hal ini penyediaan bahan kebutuhan pokok, pemerintah perlu menjamin stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat dan menjaga ketersediaanya di pasar maupun gudang dalam bentuk cadangan atau persediaan. Selain itu pemerintah juga menjaga stabilitas harga-harga umum, pemerintah juga menjamin bahwa cadangan persediaan di gudang pemerintah cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sampai waktu tertentu sampai jangka waktu tertentu untuk menghindari terjadinya kepanikan masyarakat terhadap kelangkaan bahan kebutuhan pokok tersebut.

## 2. Pelayanan Umum

Selain pelayanan kebutuhan dasar, pemerintah sebagai instansi penyedia layanan publik juga harus memberrikan pelayanan umum kepada masyarakat yang meliputi pelayanan administratif( yaitu pelayanan penyediaan berupa penyediaan berbagai bentuk dokumen yang dibutyuhkan publik). Namun terbatasnya akses-akses bagi kaum miskin menyebabkan mereka tak mampu untuk mengakumulasi kapital/modal yang yang diperlukan untuk keluar dari jebakan kemiskinan (*poverty trap*). Akibat minimnya akumulasi kapital kaum miskin , konsekuensinya , kaum miskin mampu berperan aktif dalam kegiatan ekonomi dan merasakan berkah dari adanya pembangunan. Hal tersebutlah yang mendasari betapa pentingnya pembangunan manusia, dimana dalam pembangangunan manusia tersebut tidak hanya meliputi dimensi kesejahteraan saja melainkan juga dengan meningkatkan kapasitas dasar

manusia melalui akses terhadap pendidikan dan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin.

## 2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses terjadinya kenaikan produk nasional bruto atau pendapatan nasional riil. Dengan kata lain, perekonomian mengalami perkembangan jika terjadi pertumbuhan output riil. Menurut Suryana(2000:5) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP ( Gross Domestic Product) tanpa memandang kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk yang terjadi, serta tanpa memandang apakah terjadi perubahan dalam struktur perekonomiannya atau tidak.

Menurut Boediono (Tarigan,2004:46)”pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang”. Menurut Kuznet( dalam Todaro 2004:99) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Berikut beberapa teori Pertumbuhan Ekonomi :

### 1. Teori Pertumbuhan Klasik

Menurut Adam Smith sebagai ahli ekonomi klasik, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Kemudian menurut David Ricardo, bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses tarik-menarik antar dua kekuatan yaitu “ *the law of deminishing return*” dan kemajuan teknologi. Sedangkan menurut Mill, bahwa pembangunan ekonomi tergantung pada dua jenis perbaikan, yaitu perbaikan dalam tingkat pengetahuan masyarakat dan perbaikan yang berupa usaha-usaha untuk menghapus pengahambat pembangunan seperti adat istiadat, kepercayaan, dan berfikir tradisional (Suryana,2000:55).

Dari beberapa pendapat ahli ekonomi klasik dapat ditarik kesimpulan bahwa (Suryana, 2000:57):

- 1) Tingkat perkembangan suatu masyarakat tergantung pada empat faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok modal, luas tanah, dan tingkat teknologi yang dicapai.
- 2) Kenaikan upah yang akan menyebabkan kenaikan penduduk.
- 3) Tingkat keuntungan merupakan faktor yang menentukan pembentukan modal.

Bila tidak terdapat keuntungan, maka akan mencapai “*stationary state*”, yaitu suatu keadaan dimana perkembangan ekonomi tidak terjadi sama sekali. *The law of deminishing return* berlaku untuk segala kegiatan ekonomi sehingga mengakibatkan pertambahan produk yang akan menurunkan tingkat upah, menurunkan tingkat keuntungan, tetapi menaikkan tingkat sewa tanah.

## 2. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Pada pertengahan tahun 1950-an berkembang teori pertumbuhan neo-klasik yang merupakan suatu analisis pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada pandangan-pandangan ahli ekonomi klasik. Perintisnya adalah Solow, kemudian diikuti dan dikembangkan oleh Edmund Philips, Harry Johson, dan J.E Meade. Pendapat-pendapat para ahli tersebut, yaitu (Suryana, 2000:58):

- 1) Adanya akumulasi kapital yang merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi.
- 2) Perkembangan merupakan proses yang gradual dan kontinu
- 3) Perkembangan merupakan proses yang harmonis dan kumulatif, meliputi :
  - a) *Internal economic*, terdapat perluasan skala produksi diakibatkan oleh perbaikan manajemen, akibat perbaikan cara produksi, perbaikan alat-alat produksi
  - b) *External economic*, terjadi perluasan skala secara umum akibat ilmu pengetahuan, kebudayaan dan kebijakan pemerintah

- 4) Adanya pikiran yang optimis terhadap perkembangan ekonomi, perkembangan ekonomi dalam jangka panjang akan mengalami kemacetan akibat adanya hambatan alamiah yaitu keterbatasan daya dukung lingkungan, namun inovasi teknologi dapat menghambat terjadinya perkembangan ekonomi
- 5) Aspek internasional sangat mempengaruhi proses perkembangan. Terjadi perluasan pasar melalui perdagangan antar negara dan spesialisasi peran dalam perdagangan tersebut yang dikemukakan dalam konsep keunggulan komparatif dan *teori reproduksi dinamika kapital* Neoklasik

Selanjutnya dalam Sukirno (2004:437), menurut Solow yang menjadi faktor terpenting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukan hanya penambahan modal dan tenaga kerja. Namun faktor yang terpenting adalah kemajuan teknologi dan penambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja.

### 3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern

#### 1). Teori Pertumbuhan Rostow

Rostow mengartikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan perubahan dalam masyarakat, yaitu perubahan politik, struktur sosial, nilai sosial, dan struktur kegiatan ekonominya. Dan dalam bukunya "*The Stages of economic* " (1960), Rostow mengemukakan tahap-tahap dalam proses pembangunan ekonomi yang dialami oleh setiap negara pada umumnya ke dalam lima tahap, yaitu (Arsyad 2004:48):

- 1) Masyarakat tradisional yaitu masyarakat yang strukturnya dibangun dari fungsi produksi yang terbatas. Produksinya menggunakan cara-cara yang masih kuno, cara hidup masih menggunakan kebiasaan yang berlaku secara turun menurun IPTEK belum digunakan secara maksimal,
- 2) Persyaratan tinggal landas yaitu masyarakat ini untuk mencapai prasyarat tinggal landas dengan merubah masyarakat tradisional dan tanpa mengubah masyarakat

tradisional karena masyarakatnya sudah mempunyai syarat-syarat yang dibutuhkan sebab para penduduknya kebanyakan pendatang (*imigran*),

- 3) Tinggal landas yaitu pada tahap ini berlaku perubahan yang sangat drastis dalam masyarakat seperti ada resolusi politik dan tercipta terbukanya pasar,
- 4) Menuju kematangan yaitu masyarakat yang sudah dapat mampu dengan kekuatan sendiri untuk lebih maju ke tahap berikutnya,
- 5) Tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi yaitu masa perekonomian yang di cita-citakan segala sesuatu kebutuhan telah dapat terpenuhi, memungkinkan orang yang tidak bekerja mendapatkan pendapatan.

## 2). Teori pertumbuhan modern menurut Kuznet

Kuznet mendefinisikan (Jhingan, 2000:57) pertumbuhan ekonomi sebagai jangka panjang untuk menyediakan berbagai jenis barang ekonomi yang terus meningkat kepada masyarakat. Kemampuan ini tumbuh berdasarkan kemajuan teknologi, institusional, dan ideologis yang diperlukannya. Definisi ini mempunyai 3(tiga) komponen yaitu :

- 1) Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus menerus persediaan barang
- 2) Teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka barang kepada penduduk
- 3) Penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara tepat

### **2.1.5 Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah (Pendidikan dan Kesehatan) dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi

yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya. ( Dumairy,1997:163)

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta semakin besar akan menimbulkan banyak kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak.

Selain itu pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antarsektor yang makin kompleks. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri akan menimbulkan semakin tingginya pencemaran atau polusi. Pemerintah harus turun tangan mengatur dan mengurangi dampak negatif dari polusi. Pemerintah juga harus melindungi buruh yang berada dalam posisi yang lemah agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka (Brata,2005:8)

Musgrave berpendapat “bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam presentase terhadap PDB semakin besar dan presentase investasi pemerintah terhadap PDB akan semakin kecil). Pada tingkat ekonomi lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua, program pendidikan, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya( Mangkoesobroto 1994: 170)

Teori Rostow dan Musgrave adalah pandangan yang timbul dari pengamatan atas pengalaman pembangunan ekonomi yang dialami banyak negara tetapi tidak didasari oleh suatu teori tertentu. Selain tidak jelas apakah tahap pertumbuhan ekonomi terjadi dalam tahap demi tahap atau beberapa tahap dapat terjadi secara simultan(Mangkoesobroto 1994:171). Pendidikan dan kesehatan yang baik akan

meningkatkan kapasitas dan kemerdekaan hidup yang dinamakan manfaat intrinsik. Pendidikan dan kesehatan berperan membuka peluang yang lebih besar untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi yang dinamakan manfaat instrumental.

Pendidikan dan kesehatan penduduk sangat menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan pendidikan yang baik, pemanfaatan teknologi ataupun inovasi teknologi menjadi mungkin untuk terjadi. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 ada disebutkan bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus mengalokasikan 20 persen anggaran untuk bidang pendidikan di luar gaji dan biaya kedinasan. Jadi, anggaran pendidikan yang dimaksud di sini adalah termasuk kategori anggaran pembangunan karena tidak termasuk di dalamnya anggaran rutin yang berupa gaji dan lain-lain.

Sedangkan untuk masalah kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya. Terkait dengan teori *Human Capital* bahwa modal manusia berperan signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi (Setiawan, 2006 : 4)

Negara sedang berkembang seperti Indonesia sedang mengalami tahap perkembangan menengah, dimana pemerintah harus menyediakan lebih banyak sarana publik seperti kesehatan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah melalui pengeluaran pemerintah.

## **2.1.6 Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dengan IPM**

Menurut Midgley (1995) (dalam Devianti,2012:38) pembangunan sosial merupakan penelekatan pembangunan secara eksplisit berusaha mengintegrasikan proses pembangunan ekonomi dan sosial. Pembangunan sosial tidak dapat berjalan

dengan baik tanpa adanya pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan ekonomi tidaklah bermakna kecuali diikuti dengan peningkatan kesejahteraan sosial dari populasi sebagai suatu kesatuan. Pembangunan ekonomi atau lebih tepatnya pertumbuhan ekonomi merupakan syarat bagi tercapainya pembangunan manusia karena dengan pembangunan ekonomi terjamin peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja.

Tingkat pembangunan manusia yang relatif tinggi akan mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi melalui kapasitas penduduk dan konsekuensinya adalah peningkatan produktivitas dan kreativitas masyarakat. Dengan meningkatnya produktivitas dan kreativitas tersebut, penduduk dapat menyerap dan mengelola sumber daya yang penting bagi pertumbuhan ekonomi (Brata, 2005:1).

Menurut UNDP (1996) hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) kriteria, yaitu seimbang (*balanced*) dan tidak seimbang (*unbalanced*). Untuk yang seimbang dibedakan lagi antara kuat dan lemah. Kategori seimbang yang pertama, terjadi hubungan kuat (*strong link*) antara pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia. Sementara kategori seimbang yang kedua, berlangsung hubungan lemah (*weak link*) antar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Kategori tidak seimbang” (*unbalanced link*) memiliki ciri pertumbuhan ekonomi relatif lambat tetapi pembangunan manusia relatif cepat atau sebaliknya (Brata, 2005:6) .

Istilah modal manusia (*Human Capital*) pertama kali dikemukakan oleh Gary S. Becker. Ace Suryadi (1994) yang mengkaji lebih dalam mengenai peran pendidikan formal dalam menunjang pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa, semakin tinggi pendidikan formal yang diperoleh, maka produktivitas tenaga kerja akan semakin tinggi pula. Hal tersebut sesuai dengan teori Human Capital, yaitu bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena pendidikan berperan di dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Teori ini menganggap pertumbuhan penduduk ditentukan oleh produktivitas perorangan. Jika setiap orang memiliki penghasilan yang lebih tinggi karena pendidikannya lebih tinggi, maka pertumbuhan

ekonomi penduduk dapat ditunjang. Sejak tahun 1999, United Nations Development Program (UNDP) mengenalkan konsep pengukuran mutu modal manusia yang diberi nama Human Development Index atau disebut IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Adanya peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) dapat memungkinkan meningkatnya output dan pendapatan dimasa yang akan datang sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.(Devianti,2012:43)

## 2.2 Penelitian Sebelumnya

Studi mengenai pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan serta pertumbuhan ekonomi . Secara ringkas disajikan ringkasan penelitian-penelitian sejenis yang men adi referensi dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Irawan (2009) dengan judul “Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia” yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dalam hal ini PDB, Anggaran pengeluaran pemerintah, Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Metode yang digunakan adalah OLS dengan menggunakan model analisis regresi linear logaritme. Penelitian ini menggunakan observasi sebanyak 18 tahun dari periode 1990 sampai 2007, data yang ada diproses dengan menggunakan e-views 5.1. Hasil penelitian adalah dari empat variabel memberikan pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia dan signifikan pada alpha( $\alpha$ ) 1%( CI=99%) yaitu PDB, Anggaran Pengeluaran Pemerintah, Penanaman Modal Asing dan variabel Penanaman Modal Dalam Negeri tidak signifikan tetapi memberikan pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Brata (2005) dengan judul “Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan” yang bertujuan untuk mengkaji untuk melakukan pembuktian empiris mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah daerah, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan terhadap tingkat pembangunan manusia dalam konteks regional (antar-propinsi) di Indonesia. Selain itu

penelitian ini bertujuan juga untuk memperoleh bukti empiris hubungan antara tingkat pembangunan manusia dan tingkat kemiskinan. Estimasi dilakukan dengan metode OLS terhadap data pooled tahun 1996, 1999, 2002. Pengeluaran sosial bukan hanya memberikan manfaat bagi pembangunan manusia, tetapi juga pada pengurangan tingkat kemiskinan (TK). Hal ini tampak dari signifikannya koefisien variabel IPP (pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan) maupun LAGIPP (pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan) terhadap TK (1). Seperti juga pada IPM, pengaruh jangka panjang dari pengeluaran sosial (LAGIPP) ini terhadap tingkat kemiskinan lebih besar.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2010) dengan judul “Analisis Dampak Realisasi APBD Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Binjai” tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Binjai dalam kurun waktu 20 tahun dari tahun 1989-2008. Dalam persamaan model, indeks pembangunan manusi adalah sebagai variabel terikat (y) sedangkan pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan (x1) dan kesehatan(x2) adalah variabel bebas. Metode penelitian yang digunakan dalam analisis ini adalah OLS dengan menggunakan metode regresi linear berganda dan alat analisis yang dipakai adalah menggunakan e-views 5.1. hasil estimasi dari penelitian menunjukkan bahwa semua variabel bebas berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia signifikan pada alpha 10%.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Devianti (2012) dengan judul” Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ipm di sulawesi selatan periode 2001-2010” tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, presentase penduduk miskin,pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan, ketimpangan distribusi pendapatan terhadap perkembangan Indeks pembangunan manusia di sulawesi selatan dalam kurun waktu 10 tahun dari tahun 2001 samapi tahun 2010. Metode penelitian yang digunakan dalam analisis ini adalah OLS dengan menggunakan metode regresi linear berganda dan alat analisis yang digunakan adalah

SPSS R.12. Hasil estimasi dari penelitian menunjukkan dari kelima variabel memberikan pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan pada  $\alpha$  5% dan keyakinan 95%.

Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Sebelumnya

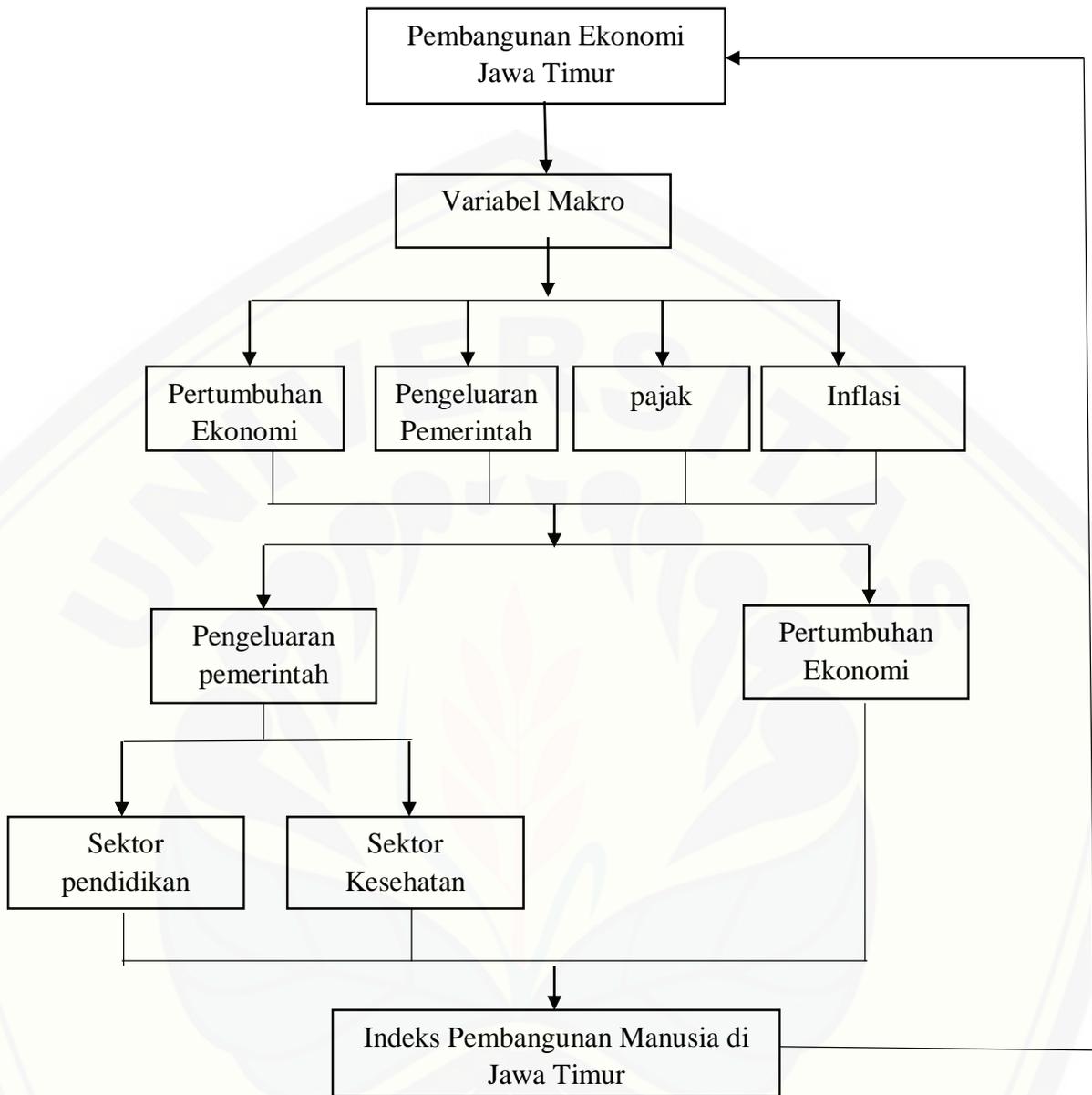
Peneliti,tahun	Judul penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Ilham Irawan, Muhammad (2009)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia	Analisis Regresi Linear Dengan Metode <i>Ols(Ordinary Least Square)</i>	-Secara bersama-sama PDB,Anggaran Pengeluaran Pemerintah dan Penanaman Modal Asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM dan signifikan pada alpha ( $\alpha$ )1%(CI=99%) -PMDN tidak signifikan tetapi memberikan pengaruh positif terhadap IPM di Indonesia
Brata,Aloysius Gunadi (2005)	Investasi sektor publik lokal, pembangunan manusia dan kemiskinan	Metode yang digunakan <i>OLS(Ordinary Least Square)</i> dengan menggunakan data pooled	Secara bersama-sama investasi sektor publikbidang sosial, investasitansi swasta dan distribusi pendapatan secara umum berpengaruh kuat terhadap pembangunan ekonomi dan kemiskinan
Nasution, Abdul Azis (2010)	Analisis Dampak Realisasi APBD Terhadap Peningkatan IPM di Kota Binjai	Analisis Regresi Linear Berganda Metode <i>OLS(Ordinary Least Square)</i>	Semua variabel bebas :pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan(X1) dan pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan(X2) berpengaruh positif terhadap IPM(Y)

			yang signifikan pada alfa 10%
Patta, Devianti (2012)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi IPM di Sulawesi Selatan periode 2001-2010	Analisis Regresi linear berganda	Pengaruh presentase penduduk miskin, berpengaruh signifikan $0,02 < 0,05$ . pengeluaran pemerintah bidang kesehatan 0,013 dan pendidikan 0,001 secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembanguana manusia di sulawesi selatan

### 2.3 Kerangka Konseptual

Salah satu masalah yang penting dalam pembangunan suatu daerah adalah rendahnya pembangunan manusia yang tercermin dari pertumbuhan atau Nilai IPM. Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator kemajuan suatu negara. Secara konsep, pembangunan manusia merupakan upaya yang dilakukan untuk memperluas peluang penduduk untuk mencapai hidup layak , yang dilakukan melalui kapasitas dasar dan daya beli serta peningkatan pengetahuan dan derajat kesehatan.

Selama ini pengeluaran pembangunan pemerintah provinsi masih terkonsentrasi pada bidang infrastuktur ekonomi dan belum memberikan perhatian yang memadai bagi bidang pembangunan manusia serta efisiensi investasi sektor publik juga masih rendah (Brata,2005). Untuk itu diperlukan pengelolaan distribusi dana APBD untuk investasi sumber daya manusia. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, dalam melakukan tentang mengenai IPM khususnya di Jawa Timur maka variabel yang akan diukur yaitu : pertumbuhan ekonomi , pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan.



## 2.1 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan dari teori-teori yang sudah dijelaskan serta penelitian-penelitian yang terdahulu, maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur.
2. Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur.
3. Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur.

## BAB 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis *explanatory research* yaitu dalam metode penelitian ini menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan terikat (Singarimbun 1950:5). Penelitian ini akan menjelaskan hubungan antara variabel pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur.

### 3.2 Unit Analisis Data

Unit analisis dalam penelitian ini untuk mengetahui perkembangan Indeks Pembangunan Manusia diprovinsi Jawa Timur. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel terikat, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan sebagai variabel bebas. Wilayah provinsi Jawa Timur selama kurun waktu tiga belas tahun dari 2001-2013.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, literatur, internet, catatan-catatan, serta sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data sekunder yaitu data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya (Dajan 1991:8). Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain :

1. Data Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur tahun 2001-2013
2. Data Pertumbuhan ekonomi (PDRB) Jawa Timur 2001-2013
3. Data pengeluaran pemerintah sektor kesehatan Jawa Timur tahun 2001-2013
4. Data pengeluaran pemerintah sektor pendidikan Jawa Timur tahun 2001-2013

### 3.4 Metode Analisa Data

#### 3.4.1 Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis data regresi linier berganda (*Multiple Regression Model*) dengan menggunakan uji asumsi klasik (*Ordinary Least Square*). Regresi linier berganda digunakan karena dalam penelitian ini mencakup dari dua variabel (termasuk variabel Y), dimana dalam regresi linier berganda variabel terikat Y tergantung pada dua atau lebih variabel bebas (Surpranto, 1195:48). Metode regresi linier ini digunakan untuk mengestimasi pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan dan sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur tahun 2001-2013. Model ekonometrika persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini yaitu (Gujarati, 1997:91):

$$Y_t = b_0 + b_1X_{1t} + b_2X_{2t} + b_3 X_{3t} + \epsilon$$

Keterangan :

- $Y_t$  = Indeks pembangunan Manusia (persen)
- $X_{1t}$  = pertumbuhan ekonomi (persen);
- $X_{2t}$  = pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (rupiah);
- $X_{3t}$  = pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (rupiah);
- $b_0$  = Intercept;
- $b_1, b_2, b_3$  = koefisien regresi
- $\epsilon$  = variabel pengganggu.
- $t$  = Tahun

## 3.4.2 Uji Statistik

### 1. Uji Statistik Secara Serentak ( Uji F)

Uji Statistik Secara Serentak atau uji F dilakukan untuk menguji adanya pengaruh variabel bebas ( pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan ) secara serentak terhadap variabel tidak bebas ( Indeks Pembangunan Manusia ) dilakukan Uji Fisher ( F-Test) dengan rumus sebagai berikut ( Gujarati 2003:87)

$$F_{hitung} = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Dimana :

$R^2$  = koefisien determinasi berganda

k = banyaknya variabel

n = banyaknya observasi

Rumusan hipotesis disusun sebagai berikut:

1.  $H_0 : b_1 = 0$ , artinya secara bersama-sama variabel bebas ( pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan ) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel tidak bebas ( Indeks Pembangunan Manusia ).
2.  $H_1 : b_1 \neq 0$ , artinya secara bersama-sama variabel bebas ( pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan ) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel tidak bebas ( Indeks Pembangunan Manusia ).

Kriteria pengambilan keputusan :

1. Jika probabilitas  $F_{hitung} \leq$  level signifikan ( $\alpha = 5\%$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas (Pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan) secara serentak terhadap variabel tidak bebas (Indeks pembangunan Manusia).

2. Jika probabilitas  $F_{hitung} >$  level signifikan ( $\alpha = 5\%$ ), maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas (Pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan) secara serentak terhadap variabel tidak bebas (Indeks Pembangunan Manusia).

## 2 Uji Statistik Secara Parsial (Uji t)

Uji Statistik secara parsial atau Uji t dilakukan untuk menguji adanya pengaruh masing-masing variabel bebas (pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi) terhadap variabel tidak bebas (Indeks Pembangunan Manusia). Uji regresi dengan menggunakan uji t ( $t_{test}$ ) dari masing-masing koefisien regresi dengan menggunakan rumus (Gujarati, 2003:88) sebagai berikut :

$$t_{hitung} = \frac{b_1}{Sb_1}$$

Dimana:

$b_1$  = koefisien regresi

$Sb_1$  = standart error koefisien regresi dengan derajat keyakinan 90%

Rumusan hipotesis disusun sebagai berikut:

1.  $H_0 : b_1 = 0$ , artinya tidak ada pengaruh signifikan antara masing-masing variabel bebas (pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi) terhadap variabel tidak bebas (Indeks Pembangunan Manusia).
2.  $H_1 : b_1 \neq 0$ , artinya ada pengaruh signifikan antara masing-masing variabel bebas (pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi) terhadap variabel tidak bebas (Indeks Pembangunan Manusia).

Kriteria pengambilan keputusan :

1. Jika probabilitas  $t_{hitung} \leq$  level signifikan ( $\alpha=5\%$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel bebas (pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi) terhadap variabel tidak bebas (Indeks Pembangunan Manusia).

2. Jika probabilitas  $t_{hitung} > \text{level signifikan } (\alpha=5\%)$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel bebas (pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi) terhadap variabel tidak bebas (Indeks Pembangunan Manusia).

### 3. Koefisien Determinasi Berganda ( $R^2$ )

Definisi koefisien determinasi merupakan besaran yang memberi informasi mengenai proporsi varian dalam variabel tidak bebas (Indeks Pembangunan Manusia) yang dijelaskan oleh variabel bebas (Pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan) (Gujarati 2003:9)

Koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen secara bersama-sama memberi penjelasan terhadap variabel dependen dimana nilai  $R^2$  berkisar antara 0 sampai 1 ( $0 < R^2 < 1$ ) semakin besar nilai  $R^2$  maka semakin besar pula variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen yang dapat dijelaskan oleh variabel dependen.

### 3.4.3 Uji Asumsi Klasik

#### 5. Uji Normalitas

Dalam analisis ekonometrika yang selama ini dilakukan beranggapan bahwa variabel pengganggu memiliki distribusi normal, sehingga Uji F dan Uji t dapat dilakukan. Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengevaluasi apakah nilai residual dari model yang dibentuk sudah normal atau tidak. Konsep pengujian uji normalitas menggunakan pendekatan *jarque-Berra test*. Pedoman dari J-B test adalah (Gujarati 2003:203) :

$$JB = \left[ \frac{S^2}{6} + \frac{(K-3)^2}{24} \right]$$

Dimana  $n$  adalah jumlah sampel,  $S$  = Skewness, dan  $K$  = Kurtosis. Setelah JB hitung diketahui kemudian dibandingkan dengan  $\chi^2$  tabel (Chi square) dimana df (degree of freedom) 2 adalah 5,991447.

Dengan kriteria pengambilan keputusan adalah:

1. Bila nilai JB hitung  $>$  nilai  $X^2_{\text{tabel}}$  atau nilai probabilitas JB hitung  $<$  nilai probabilitas  $\alpha = 5\%$ , maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual,  $\mu_t$  berdistribusi normal ditolak;
2. Bila nilai JB hitung  $<$  nilai  $X^2_{\text{tabel}}$  atau nilai probabilitas JB hitung  $>$  nilai probabilitas  $\alpha = 5\%$ , maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual,  $\mu_t$  berdistribusi normal diterima.

## 6. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang sempurna atau esak (*perfect of exact*) diantara beberapa variabel atau semua variabel bebas dalam model regresi. Multikolinieritas terjadi apabila dalam suatu model regresi tak satupun variabel bebas mempunyai koefisien regresi dari hasil *Ordinary Least Square* (OLS) signifikan secara statistik atau dengan kata lain nilai  $F_{\text{hitung}}$  dan  $R^2$  signifikan sedangkan sebagian atau seluruh koefisien regresi tidak signifikan (Santoso, 2000:46). Apabila koefisien korelasi yang bersangkutan nilainya terletak di luar batas-batas penerimaan (*critical value*) maka koefisien korelasi bermakna dan terjadi multikolinieritas, begitu pula sebaliknya apabila koefisien korelasi di dalam batas-batas penerimaan maka koefisien korelasinya tidak bermakna dan tidak terjadi multikolinieritas.

Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas ini digunakan Uji Kleins dengan cara melakukan regresi sederhana antara variabel bebas dengan menjadikan salah satu variabel terikat, dengan asumsi regresi antara variabel independen tidak diperbolehkan untuk saling berkorelasi. Beberapa indikator dalam pengujian multikolinieritas antara lain (Gujarati, 2003: 166) :

1. Nilai  $R^2$  yang diperoleh dari hasil suatu estimasi model sangat tinggi, tetapi variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel independen.
2. Dengan melakukan regresi auxiliary yaitu meregresikan variabel independen dengan variabel penjelas lainnya kemudian dibandingkan masing-masing nilai  $R^2$ -nya. Apabila  $R^2$  dalam persamaan ini lebih besar daripada nilai  $R^2$  model awal, maka model tersebut terkena multikolinearitas.

## 7. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah kesalahan pengganggu mempunyai varian yang sama. Pengujian dilakukan dengan menggunakan pengujian White (White Test) dengan langkah-langkah sebagai berikut (Gujarati, 2003:177):

- 1) Melakukan regresi variabel terikat  $Y$  terhadap semua variabel penjelas  $X_1$  dan memperoleh nilai residual ( $e$ )
- 2) Melakukan regresi dari nilai absolut residual ( $|e|$ ) terhadap  $X_1$  yang mempunyai hubungan erat dengan  $\delta_1 x_1 + \mu_1$
- 3) Menentukan ada tidaknya heteroskedastisitas dalam uji statistic, untuk menguji hipotesis :  $H_0 : \delta_1 = 0$  dan  $H_0 : \delta_1 \neq 0$

Kriteria pengambilan keputusan :

1. Apabila  $t_{hitung} < level\ of\ significance$  ( $\alpha = 5\%$ ) nilai positif atau  $t_{hitung} > level\ of\ significance$  ( $\alpha = 5\%$ ) nilai negatif, maka  $H_0$  ditolak sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.
2. Apabila  $t_{hitung} > level\ of\ significance$  ( $\alpha = 5\%$ ) nilai positif atau  $t_{hitung} \leq level\ of\ significance$  ( $\alpha = 5\%$ ) nilai negatif, maka  $H_0$  diterima sehingga terjadi heteroskedastisitas.

## 8. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah kesalahan pengganggu masing-masing variabel bebas saling mempengaruhi atau berkorelasi. Jika kesalahan pengganggu masing-masing variabel terikat saling mempengaruhi maka terjadi autokorelasi. Untuk mengetahui apakah pada model regresi mengandung autokorelasi digunakan uji LM oleh Breusch dan Godfrey. Apabila  $X^2_{hitung}$  (nilai  $obs \cdot R-squared$ )  $> X^2_{tabel}$  maka dalam model terjadi autokorelasi, begitu pula sebaliknya (Gujarati, 2003:200).

### 3.5. Definisi Operasional variabel

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, maka batasan variabel dalam penelitian ini antar lain :

1. Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam satuan persen.
2. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output rill suatu perekonomian yang diukur dengan perubahan PDRB rill menurut harga konstan. Variabel tersebut dihitung dalam satuan persen
3. Pengeluaran pemerintah atas kesehatan adalah besarnya pertumbuhan alokasi belanja kesehatan pemerintah provinsi Jawa Timur untuk sektor kesehatan yang mencerminkan pengeluaran pemerintah dari total belanja yang dialokasikan untuk sektor kesehatan. Variabel tersebut dihitung dalam satuan rupiah
4. Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan adalah merupakan besarnya pertumbuhan pengeluaran pemerintah provinsi Jawa Timur untuk sektor pendidikan yang mencerminkan pengeluaran pemerintah dari total belanja yang dialokasikan untuk pendidikan. Variabel tersebut dihitung dalam satuan rupiah.

## BAB 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Timur

#### 4.1.1 Kondisi dan Letak Geografis

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Jawa. Provinsi membentang antara 111<sup>00</sup>' hingga 114<sup>04</sup>' bujur timur dan 7<sup>012</sup>' hingga 8<sup>048</sup>' lintang selatan dengan ibukota yang terletak di Kota Surabaya. Di sebelah utara, provinsi ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Bagian selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia. Bagian barat berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah sedangkan bagian timur berbatasan dengan Selat Bali. Secara umum Jawa Timur dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu Jawa Timur daratan dengan proporsi hampir mencapai 90 persen dari seluruh wilayah Jawa Timur, dan Kepulauan Madura yang mencakup hanya sekitar 10 persen. Jawa Timur memiliki 229 pulau terdiri dari 162 pulau bernama dan 67 pulau tak bernama, dengan panjang pantai berkisar 2.833,85 Km. Untuk lebih jelas dalam mengetahui tata letak dan batasan-batasan provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada Gambar 4.1



Sumber : BPS Jawa Timur, 2012

Gambar 4.1 Peta Jawa Timur

Secara administratif, wilayah Jawa Timur memiliki luas wilayah mencapai 46.428,57 Km yang terdiri dari 38 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota. Daerah di Jawa Timur yang memiliki wilayah terluas adalah Kab. Banyuwangi dengan luas 5783 Km<sup>2</sup>, Kab. Malang dengan luas 2979 km<sup>2</sup>, dan kab. Jember dengan luas 2478 km<sup>2</sup> sedangkan daerah perkotaan yang paling luas adalah kota Surabaya dengan luas daerah 326 Km<sup>2</sup> dan Kota Malang dengan luas daerah 110 Km<sup>2</sup>.

Jawa Timur memiliki topografi yang beragam, ada yang berupa pegunungan, perbukitan dan kepulauan. Oleh karena itu, di wilayah Jawa Timur memiliki sumber daya pertanian, kehutanan, kelautan dan pertambangan yang potensial. Di provinsi ini terdapat 48 gunung, dimana 11 diantaranya berketinggian di atas 2.000 m dan masih aktif. Bagian selatan wilayah Jawa Timur pada umumnya bergunung-gunung dan berpantai curam sedangkan di bagian utara membujur dataran rendah dan pantai yang landai. Terdapat 2 sungai besar yang menjadi urat nadi sekaligus sumber kemakmuran Jawa Timur, yaitu Sungai Brantas dan Bengawan Solo. Jawa Timur termasuk dalam iklim tropis dengan musim pengujan yang berlangsung antara Oktober – Maret dan kemarau antara April – September setiap tahun dengantemperatur berkisar antara 18<sup>0</sup>-35<sup>0</sup> Celcius.

Jawa Timur termasuk dalam iklim tropis basah dengan curah hujan yang lebih sedikit dibandingkan curah hujan di provinsi lain di Pulau Jawa. Provinsi ini memiliki curah hujan rata-rata 1.900 mm per tahun dengan musim hujan selama 100 hari. Suhu di daerah pegunungan lebih rendah bahkan di daerah Ranu Pani (lereng gunung semeru) mencapai minus 4<sup>0</sup> Celcius yang menyebabkan turunnya salju lembut. Struktur geologi di provinsi ini di dominasi oleh batuan sedimentas Alluvium. Bagian tengah wilayah Jawa Timur terdapat persebaran bebatuan hasil gunung berapi sehingga daerah ini relatif subur. Beragam jenis bebatuan di Jawa Timur menyebabkan ketersediaan bahan tambang yang cukup besar di wilayah ini.

Provinsi Jawa Timur secara geografis memiliki letak yang cukup strategis dimana Provinsi Jawa Timur memberikan keuntungan bagi daerah ini karena menghubungkan wilayah Indonesia bagian barat dan wilayah Indonesia bagian tengah.

Selain itu, Jawa Timur juga berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Bali menjadikan Provinsi Jawa Timur sebagai jembatan dalam jalur investasi dalam negeri maupun investasi asing. Dengan demikian, Provinsi Jawa Timur berpotensi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia wilayah timur. Faktor lain yang menjadi peluang bagi Jawa Timur sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia wilayah timur adalah meningkatnya jumlah penduduk usia kerja (19-34 tahun) yang termasuk penduduk usia produktif yang termasuk dalam penduduk angkatan kerja. Kondisi tersebut yang harus dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah setempat. Untuk itu perlu adanya daya dukung dalam pengembangan sumber daya manusia sebagai salah satu dari pilar pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan nilai tambah bagi Provinsi Jawa Timur.

#### **4.1.2 Keadaan Penduduk Di Provinsi Jawa Timur**

Penduduk merupakan aset dalam pembangunan. Hal ini dikarenakan penduduk sebagai penentu dalam perkembangan pembangunan. Penduduk sebagai subjek dan sasaran dalam pembangunan. Selain itu, penduduk juga bisa menjadi beban pembangunan jika pemberdayaan tidak diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai pada wilayah atau daerah yang bersangkutan. Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah penduduk yang meningkat dari tahun ke tahun, bahkan jumlah penduduk di Jawa Timur menduduki posisi ke dua setelah provinsi Jawa Barat.

Pada tahun 1998, jumlah penduduk di Jawa Timur adalah sebesar 33.447.470 jiwa. Kota Surabaya menjadi daerah yang mempunyai jumlah penduduk paling besar yaitu 2.373.082 jiwa sedangkan daerah dengan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah 107.123 jiwa. Jumlah penduduk di Jawa Timur terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005, jumlah penduduk di Jawa Timur mencapai 37.070.731 jiwa.

Tabel 4.1 Distribusi Penduduk menurut Kota/Kab di provinsi Jawa Timur 2010

Kota/Kabupaten	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)	Pertumbuhan (%)	Sex Ratio
Pacitan	263.919	276.597	540.516	0,27	95
Ponorogo	427.365	427.513	854.878	0,15	100
Trenggalek	334.769	339.752	674.521	0,37	99
Tulungagung	482.609	507.212	989.821	0,62	95
Blitar	559.219	556.791	1.116.010	0,47	100
Kediri	752.233	749.570	1.501.803	0,62	100
Malang	1.227.880	1.215.729	2.443.609	0,85	101
Lumajang	490.490	516.073	1.006.563	0,42	95
Jember	1.151.906	1.194.592	2.346.498	0,70	96
Banyuwangi	772.745	782.252	1.554.997	0,43	99
Bondowoso	358.181	378.349	736.530	0,67	95
Situbondo	315.613	331.887	647.500	0,70	95
Probolinggo	534.262	561.108	1.095.370	0,86	95
Pasuruan	747.376	762.885	1.308.484	0,98	98
Sidoarjo	977.683	967.569	1.945.252	2,21	101
Mojokerto	510.839	512.687	1.023.526	1,20	100
Jombang	597.224	604.333	1.201.557	0,64	99
Nganjuk	505.265	511.128	1.016.393	0,43	99
Madiun	326.380	335.506	661.886	0,33	97
Magetan	301.710	318.436	620.146	0,07	95
Ngawi	397.888	419.188	817.076	0,04	95
Bojonegoro	597.585	611.423	1.209.008	0,36	98
Tuban	551.869	565.670	1.117.539	0,60	98
Lamongan	527.761	607.009	1.134.770	-0,01	87
Gresik	582.746	594.445	1.177.191	1,57	98
Bangkalan	432.897	474.358	907.255	1,02	91
Sampang	426.721	450.229	876.950	1,44	95
Pamekasan	386.655	408.871	795.526	1,25	95
Sumenep	495.099	546.816	1.041.915	0,55	91
Kota Kediri	133.483	133.952	267.435	0,89	100
Kota Blitar	65.348	66.670	132.018	1	98
Kota Malang	403.961	415.747	819.708	0,79	97
Kota Probolinggo	106.812	110.155	216.967	1,21	97
Kota Pasuruan	92.394	93.928	186.322	1,01	98
Kota Mojokerto	59.032	61.100	120.132	0,89	97
Kota Madiun	82.677	88.174	170.851	0,41	94
Kota Surabaya	1.367.159	1.398.746	2.765.905	0,62	98
Kota Batu	95.535	94.258	189.793	1,20	101
<b>Jumlah</b>	<b>18.488.290</b>	<b>18.987.721</b>	<b>37.476.011</b>	<b>0,75</b>	<b>97</b>

Sumber: BPS Jawa Timur, 2013

Dari data sensus penduduk 2010, jumlah penduduk di Jawa Timur telah mencapai 37.576.010 dengan persentase 49,37 persen penduduk laki-laki dan 50,63 persen penduduk perempuan. Untuk mengetahui data penduduk pada tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 4.1. Pertumbuhan penduduk di provinsi Jawa Timur sejak tahun 2000 sudah berada di bawah satu persen, yaitu sebesar 0,7 persen per tahun. Selama sepuluh tahun terakhir, laju pertumbuhan penduduk di Jawa Timur seluruh kabupaten/kota telah mengalami peningkatan laju pertumbuhan kecuali Kabupaten Lamongan. Kabupaten/kota dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kabupaten Sidoarjo dengan laju sebesar 2,21 persen per tahun.

Pada tahun 2010, rasio jenis kelamin penduduk Jawa Timur (*sex ratio*) sebesar 97 atau kurang dari 100 yang artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 97 penduduk laki-laki. Hal ini berarti jumlah penduduk perempuan di Jawa Timur lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Jumlah penduduk perempuan tiga persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Diantara 38 kabupaten / kota se Jawa Timur terdapat 5 kabupaten / kota yang memiliki *sex ratio* diatas 100 yaitu Kabupaten Sidoarjo sebesar 101, Kabupaten Malang sebesar 101, Kabupaten Kediri sebesar 100, Kabupaten Blitar sebesar 100, dan Kabupaten Batu sebesar 101. Sementara kabupaten / kota yang lain memiliki angka *sex ratio* terendah di bawah 100 diduduki oleh Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Bangkalan sebesar 91.

### **4.1.3 Keadaan Perekonomian di Jawa Timur**

Selama kurun waktu 2009 sampai dengan 2013 pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur sebesar 6,54%. Dimana tahun 2012 merupakan pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi pada periode tersebut yaitu sebesar 7,27%. Berdasarkan struktur perekonomian Provinsi Jawa Timur, sumbangan sektor primer (pertanian dan pertambangan/penggalian) semakin tahun semakin berkurang. Dimana tahun 2009 sektor primer tersebut sebesar 18,56% menjadi 16,51% pada tahun 2013. Hal tersebut juga dibarengi dengan berkurangnya kontribusi sektor sekunder(industri pengolahan), yaitu pada tahun 2009 sebesar 28,14% menjadi 26,60 pada tahun 2013. Namun

berkurangnya kontribusi kedua sektor tersebut di imbangi dengan semakin meningkatnya kontribusi sektor tersier ( perdagangan dan jasa) terhadap perekonomian Provinsi Jawa Timur. Dimana tahun 2009 sektor tersebut berkontribusi sebesar 37,42% menajdi 39,42 pada tahun 2013.

Tabel 4.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013

No	Tahun	PDRB Harga Konstan (juta Rupiah)	Pertumbuhan (persen)
1	2009	320,861,168.91	5.01
2	2010	342,280,764.89	6.68
3	201	366,983,277.46	7.22
4	2012	393,662,847.40	7.27
5	2013	419,428,445.69	6.55
	Pertumbuhan rata-rata		6.54

Sumber : BPS Jawa Timur, 2014

#### **4.1.4 Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur**

Dalam Human Development Report tahun 1990 tujuan utama pembangunan adalah kesejahteraan manusia (*Human Welfare*). Indikator kemajuan tidak hanya dengan pendapatan perkapita, tetapi harus mencakup pembangunan manusia. Berhasilnya pembangunan di suatu daerah maupun suatu negara dapat dilihat di wilayah itu sendiri. Indeks Pembangunan manusia menjadi indikator yang mengukur semua dimensi pokok pembangunan manusia. Indeks Pembangunan manusia di Jawa Timur selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang menggembirakan. Kondisi ini ditunjukkan oleh angka ipm pada tahun 2009 sebesar 71,06 meningkat teus setiap tahunnya, hingga mencapai 73,54 pada tahun 2013. Meningkatnya Indeks pembangunan manusia ini mengindikasikan pembangunan sosial ekonomi berimplikasi pada peningkatan kualitas masyarakat di Jawa Timur. Peningkatan angka Indeks pembangunan manusia di Jawa Timur juga tampak dari perbaikan kualitas

capaian Indeks pembangunan manusia kab/kota. Seluruh Indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Jawa Timur mengalami kenaikan. Sampang yang merupakan kabupaten dengan Indeks pembangunan manusia terendah di Jawa Timur, pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 0,72 poin dibanding dengan tahun sebelumnya hanya sebesar 62,39. IPM tertinggi tercatat di Surabaya sebesar 78,97.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur Tahun 2009-2013



Sumber : BPS Jawa Timur, 2013

Gambar 4.2

Di dalam pembangunan manusia terdapat komponen Indeks Pembangunan Manusia antara lain :

## 1) Indeks Harapan Hidup

### 1.1 Angka kelangsungan hidup bayi

Angka kelangsungan hidup bayi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah, terutama di sektor kesehatan. Angka kelangsungan hidup bayi merupakan cermin ukuran dari angka kematian

bayi yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah kematian bayi yang berumur kurang dari 1 tahun dengan kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Angka kelangsungan hidup bayi dilihat dari kematian 1000 kelahiran hidup sekitar 974 pada tahun 2012. Data tersebut memberikan makna bahwa dari 1000 kelahiran hidup terdapat 974 bayi yang mencapai 1 tahun. Sementara angka kematian bayi tahun 2012 diproyeksikan menurun menjadi 25,95 per 1000 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kelangsungan hidup bayi berbanding terbalik dengan angka kematian bayi. Semakin rendah angka kematian bayi berarti semakin besar pula peluang kelangsungan hidup bayi.

Angka kematian bayi harus terus ditekan, karena merupakan indikator penting dibidang kesehatan, hal ini menentukan Indeks Pembangunan Manusia(IPM). Angka kematian bayi di Jawa timur terus menurun, yaitu 28,31 per 1000 kelahiran,

Tabel 4.3 Angka Kematian Bayi dan Kelangsungan Hidup Bayi di Jawa Timur Tahun 2009-2012

No	Indikator	2009	2010	2011	2012
1	Angka Kematian Bayi	31,41	29,29	29,24	25,95
2	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	968,59	970,71	970,76	974,05

### 2.1 Angka usia harapan hidup

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk suatu negara. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan dan mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori. Idealnya angka harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian

secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuatkan tabel. Tetapi sistem registrasi di Indonesia belum berjalan baik maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan cara tidak langsung dengan metode Mortpak Lite.

Dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh BPS RI dengan metode tidak langsung, rata-rata Angka harapan hidup di Jawa Timur selama empat tahun(2009-2012) terakhir mengalami peningkatan yaitu dari 69,15 pada tahun 2009 menjadi 70,09 tahun 2012. Meskipun peningkatan yang tidak terlalu cepat hanya 0,94 selama empat tahun terakhir.

### 2) Indeks Pendidikan

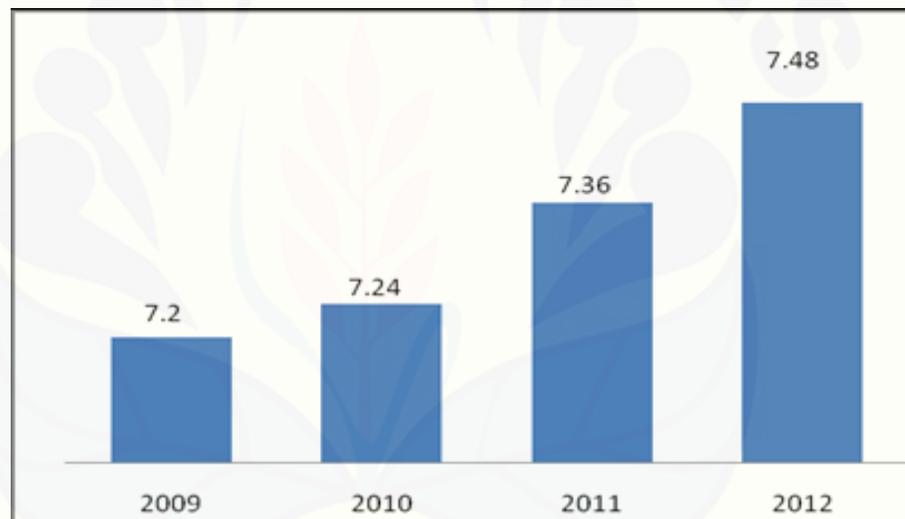
#### 2.1 Angka Melek huruf umur 15 tahun ke atas

Melek huruf merupakan indikator kunci dasar dan paling esensial diantara indikator pembangunan manusia lainnya. Pentingnya indikator ini untuk mengukur dimensi puengetahuan. Sasaran pencapaian indikator melek huruf usia 15 tahun keatas ini juga menjadi sasaran global dan nasional. Berdasarkan angka melek huruf penduduk usia 15 taun keatas di Jawa Timur, selama kurun waktu 2009-2012 terjadi peningkatan dari 87,80 ditahun 2009 menjadi 88,34 persen di tahun 2010 dan 88,79 persen di tahun 2011. Pada tahun 2012 menjadi 89,00 persen. Capaian melek huruf laki-laki mulai kelompok umur 15-19 tahun hingga 45-49 tahun diatas 90 persen, sedangkan pada perempuan mulai kelompok umur 15-19 tahun hingga 35-39 tahun diatas Kondisi ini memberikan gambaran bahwa penduduk perempuan yang buta huruf lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Oleh karenanya dalam pemberantasan buta aksara di Jawa Timur maka kelompok sasaran utama mesti lebih difokuskan pada kelompok usia 40 tahun ke atas yang capaiannya di bawah 95 persen.

## 2.2 Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolah (mean years school/MYS) merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan. MYS bersama dengan angka melek huruf, merupakan salah satu variabel komposit indeks pembangunan manusia (IPM/HDI).

Rata-rata lama sekolah di Jawa Timur



Sumber : BPS Jawa Timur, 2013

Gambar 4.3

Berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Jawa Timur, selama 2009-2012 terjadi peningkatan kualitas penduduk yaitu dari setara lulus tingkat sekolah dasar (6 tahun) ditahun 2009 meningkat menjadi setara kelas satu pada jenjang pendidikan SLTP ditahun 2012. Walaupun terjadi kenaikan, namun kenaikan tersebut relatif lambat, karena selama tahun 2009 - 2012 hanya terjadi peningkatan sebesar 0,28

poin persen atau rata-rata hanya terjadi kenaikan 0,07 poin persen per tahunnya. rata-rata lama sekolah menurut kelompok umur dari sisi jenis kelamin secara umum rata-rata lama sekolah laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Rata-rata lama sekolah penduduk di Jawa Timur tertinggi pada kelompok usia 20-24 tahun mencapai 10,08 tahun atau setara dengan kelas 1 SLTA dan terus menurun hingga pada kelompok umur 65 tahun keatas. Pembangunan pendidikan di Jawa Timur selama ini, membawa dampak peningkatan capaian pendidikan tertinggi penduduk di kelompok usia 15-34 tahun yang memiliki rata-rata lama sekolah setara lulusan SLTP. Karenanya, salah satu upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam RPJMD 2009-2014 adalah dengan mengakselerasi situasi ini melalui program Wajar Dikdas 12 tahun (setara SLTA).

Walaupun bobot dalam formulasi IPM rata-rata lama sekolah lebih rendah dibandingkan melek huruf, namun dengan melakukan intervensi pada peningkatan rata-rata lama sekolah, tentunya akan memberi pengaruh pada pencapaian melek huruf. Bisa dipastikan wilayah dengan rata-rata lama sekolah yang tinggi, akan memiliki tingkat melek huruf yang tinggi pula. Wujud pemerataan dan perluasan akses pendidikan Jawa Timur dilakukan dengan cara memperluas daya tampung satuan pendidikan, memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda secara sosial, ekonomi, gender, geografis wilayah, dan tingkat kemampuan fisik serta intelektual. Bertambahnya Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) angka Tingkat Pendidikan Rata-rata dan Angka Melek Huruf merupakan suatu indikator kunci keberhasilan pendidikan yang berlangsung saat ini. Berdasarkan data sebaran APK dan APM di Jawa Timur tahun 2009-2012, menunjukkan bahwa terdapat kaitan yang erat antara capaian APK pendidikan pada jenjang tertentu dengan jenjang di

atasnya, atau dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan semakin berkurang peserta didiknya. Untuk mencapai peningkatan APK pada jenjang yang lebih tinggi, program Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2009-2014 adalah Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 tahun.

### 3) Indeks Layak Hidup

Untuk mengukur hidup layak ( daya beli), UNDP menggunakan indikator yang dikenal dengan real perkapita GDP adjusted. Untuk perhitungan IPM sub nasional (provinsi atau kabupaten/kota) tidak memakai PDRB per kapita karena PDRB per kapita hanya mengukur produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat yang merupakan *concern* IPM. Untuk mengukur daya beli penduduk antar provinsi di Indonesia, BPS menggunakan data rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan telah distandarkan agar bisa dibandingkan antar daerah dan antar waktu yang disesuaikan dengan indeks PPP (*Purchasing Power Parity*).

Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2009-2013 di Jawa Timur, dalam lima tahun terakhir rata-rata konsumsi per kapita di Jawa Timur mengalami peningkatan, yang semula Rp. 380.163 per kapita sebulan di tahun 2009 dan di tahun 2012 meningkat menjadi Rp 526.973, sedangkan untuk data tahun 2013 belum tersedia.

Tabel 4.4 Rata-Rata Konsumsi per Kapita menurut Kelompok Konsumsi dan Status Wilayah di Jawa Timur Tahun 2009-2013 (Rupiah per Bulan)

Tahun	Status wilayah	Makanan	Bukan makanan	Total
	1	2	3	4
2009	Kota	219.238	217.742	436.980
	Desa	169.502	116.847	286.349
	Kota+desa	200.478	179.685	380.163
2010	Kota	244.457	224.564	469.021
	Desa	189.000	118.345	307.345
	Kota+desa	223.539	184.499	408.038
2011	Kota	281.107	316.024	597.131
	Desa	208.082	164.619	372.071
	Kota + Desa	242.829	236.661	479.490
2012	Kota	296.389	376.200	672.589
	Desa	207.479	187.305	394.784
	Kota + Desa	249.785	277.187	526.973
2013	Kota	326.208	-	-
	Desa	228.227	-	-
	Kota + Desa	274.764	-	-

Sumber : BPS Jawa Timur, 2014

Data untuk konsumsi non makanan belum tersedia dari BPS

Peningkatan pada tahun 2011-2012 sebesar 9,90 persen, lebih rendah bila dibandingkan dengan periode 2010-2011 yang mengalami peningkatan sebesar 17,51 persen. Sedangkan pada tahun 2013 konsumsi makanan mencapai 274.764 Namun demikian, perlu kehati-hatian dalam menafsirkan peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita ini, karena belum tentu menjadi gambaran peningkatan kesejahteraan. Mengingat terjadinya peningkatan konsumsi bisa dipengaruhi oleh terjadinya peningkatan harga yang terukur melalui inflasi, bukan karena pendapatan yang meningkat.

## 4.2 Gambaran Objek Penelitian

### 4.2.1 Gambaran Umum Pertumbuhan Ekonomi(PDRB)

Pertumbuhan ekonomi daerah mencerminkan keadaan perekonomian di suatu daerah. Pertumbuhan dan kondisi perusahaan yang beroperasi di daerah bersangkutan dipengaruhi oleh keadaan perekonomian daerah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto menjadi tolak ukur keberhasilan perekonomian daerah. Peningkatan aktivitas perekonomian yang tergambar dalam peningkatan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi di daerah ditunjukkan oleh peningkatan positif PDRB di daerah dari tahun ke tahun. Struktur PDRB dapat digunakan untuk melihat kinerja masing-masing sektor dalam memberikan kontribusi terhadap nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh perekonomian wilayah.

Tabel 4.5 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) tahun 2001-2013

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB dalam %)	Perubahan (%)
2001	3.75	
2002	3.80	0.05
2003	4.78	0.97
2004	5.83	1.06
2005	5.84	0.01
2006	5.80	-0.05
2007	6.11	0.31
2008	5.94	-0.17
2009	5.01	-0.93
2010	6.68	1.66
2011	7.22	0.54
2012	7.27	0.05
2013	6.55	-0.72
	Rata-rata Peningkatan(%)	0.23

Sumber : BPS Jawa Timur, 2014

Berdasarkan dari hasil perhitungan PDRB, dapat diketahui bahwa total PDRB Jawa Timur atas dasar harga konstan pada tahun 2013 sebesar Rp. 419,428,445.69 sedangkan pada tahun 2012 sebesar Rp. 393,662,847.40 dengan pertumbuhan sebesar 6,55 persen mengalami perlambatan dibandingkan pada tahun 2012 sebesar 7,27 persen. Hal ini dikarenakan secara sektoral secara umum pada tahun 2013 seluruh sektor mengalami perlambatan kecuali konstruksi, pengangkutan dan komunikasi serta jasa-jasa. Sektor pertanian mengalami perlambatan pada tahun 2010 dan mengalami percepatan sampai dengan tahun 2012 dan kembali melambat pada tahun 2013. Industri pengolahan yang memberikan kontribusi terbesar kedua dalam struktur PDRB mengalami percepatan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, namun mengalami perlambatan pada tahun 2013. Sektor perdagangan, hotel dan restoran yang berkontribusi dominan mengalami percepatan pada tahun 2009 dan 2010, namun mengalami perlambatan pada tahun 2011 dan kembali mengalami percepatan 10,06 persen pada tahun 2012 dan kembali melambat menjadi 8,61 persen pada tahun 2013. Situasi perekonomian global yang masih mengalami krisis sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang tercermin dari pertumbuhan sektoralnya.

Berdasarkan tabel 4.5 yakni perkembangan pertumbuhan ekonomi (PDRB) untuk tahun 2001 sampai dengan 2013 maka rata-rata pertumbuhan peningkatan ekonomi pertahun meningkat sebesar 0,23 persen. Perkembangan pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Timur dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 1,66 persen. Hal ini dikarenakan jumlah peningkatan PDRB yang terus meningkat. Namun pada tahun 2013 mengalami penurunan hingga mencapai -0,72 persen ini diakibatkan penurunan PDRB diberbagai sektor mengalami perlambatan.

#### **4.2.2 Gambaran Umum Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Kesehatan dan Sektor Pendidikan**

Pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumberdaya manusia. Pendidikan dan kesehatan merupakan aspek penting dalam

kehidupan masyarakat yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat makin baik pula kualitas sumberdayanya. Pendidikan adalah upaya sadar seseorang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta memperluas wawasan. Kesehatan masyarakat merupakan indikator tingkat kesejahteraan masyarakat. Mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari berbagai segi. dimana untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan manusia pemerintah khususnya pemerintah Jawa Timur mengalokasikan anggaran yang cukup.

**Tabel 4.6 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Kesehatan dan Sektor Pendidikan Jawa Timur Tahun 2001-2013**

Tahun	Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Kesehatan (Rp)	Perubahan Pengeluaran Pemerintah (Kesehatan) (%)	Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Pendidikan (Rp)	Perubahan Pengeluaran Pemerintah (Pendidikan) (%)
2001	79,148,840.00		94,826,880.00	
2002	103,417,760.00	31%	117,382,050.00	24%
2003	100,558,180.00	-3%	151,900,220.00	29%
2004	323,602,979,640	323%	434,718,765,079	286%
2005	385,623,761,229	19%	307,878,147,061	-29%
2006	555,161,393,854	44%	293,196,764,010	-5%
2007	522,573,115,807	-6%	208,861,926,346	-29%
2008	719,097,518,012	38%	220,848,745,698	6%
2009	936,712,780,103	30%	226,376,241,342	3%
2010	1,621,346,728,808	73%	258,566,115,961	14%
2011	1,810,290,490,986	12%	313,467,097,420	21%
2012	2,071,695,071,828	14%	415,736,190,069	33%
2013	2,070,310,334,517	0%	514,845,599.000	24%
<b>Rata-rata peningkatan (%)</b>		<b>48%</b>		<b>31%</b>

Sumber : Direktoral jenderal perimbangan dan keuangan ,data diolah 2001-2013

Dari tabel 4.6 dapat diketahui besarnya pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan dan pendidikan di Jawa Timur dapat dikatakan signifikan meningkat setiap tahunnya, dimana telah dipaparkan pada tabel perkembangan pengeluaran pemerintah

pada bidang kesehatan dan pendidikan di Jawa Timur setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Perkembangan pengeluaran pemerintah di Bidang Kesehatan dan Pendidikan dalam APBD untuk tahun 2001 sampai dengan 2013 yang menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan rata-rata meningkat sebesar 48% pertahun, sedangkan sektor pendidikan rata-rata meningkat sebesar 31% pertahun. Hal ini disebabkan karena salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi jawa timur dalam meningkatkan kesejahteraan manusia melalui peningkatan pemberian bantuan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu.

## 4.3 Hasil Analisis Data

### 4.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Setelah melalui tahapan dalam analisis statistik deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata tentang variabel yang diteliti, proses selanjutnya adalah mengumpulkan data kemudian dianalisis lebih lanjut melalui tahapan analisis statistik inferensial. Adapun alat statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda (*Ordinary Least Square*) analisis ini dilakukan terhadap Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel *dependent*.

Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	53.38692	2.092144	25.51780	0.0000
X1	0.851484	0.546334	1.558541	0.1535
X2	0.858250	0.199205	4.308381	0.0020
X3	-0.453215	0.153605	-2.950526	0.0162
R-squared	0.923542	F-statistic		36.23706
Adjusted R-squared	0.898056	Prob(F-statistic)		0.000024

Sumber : Lampiran A

Analisis regresi linier berganda berkaitan dengan studi ketergantungan suatu variabel terikat pada satu atau lebih variabel bebas dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil analisis regresi

linear berganda dengan menggunakan *EViews 7.1* untuk menguji variabel bebas pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan dan sektor pendidikan terhadap variabel terikat yaitu Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan tabel 4.7 diatas maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 53.38692 + 0.851484 X_1 + 0.858250 X_2 - 0.453215 X_3$$

Intrreprestasi dari penelitian pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan dan pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia provinsi Jawa Timur tahun 2001-2013 adalah sebagai berikut :

- a. Nilai koefisien regresi  $b_0$  sebesar 53.38692 mempunyai arti bahwa pada saat pertumbuhan ekonomi ( $X_1$ ), pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan ( $X_2$ ) dan sektor pendidikan ( $X_3$ ) pada perkembangan sama dengan nol atau konstan, maka IPM akan naik sebesar 53.38692 persen
- b. Nilai koefisien regresi dari variabel pertumbuhan ekonomi ( $b_1$ ) mempunyai nilai koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,851484 berarti bahwa apabila Pertumbuhan Ekonomi bertambah sebesar 1 persen maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,851484 persen, dengan asumsi variabel lain yaitu pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan dan sektor pendidikan dianggap tetap konstan.
- c. Nilai koefisien regresi dari variabel pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan ( $b_2$ ) mempunyai nilai koefisien regresi positif yaitu sebesar 0.858250 berarti bahwa apabila pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan bertambah sebesar 1 persen maka akan meningkatkan Indeks pembangunan manusia sebesar 0.858250 dengan asumsi variabel lain yaitu pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dianggap tetap atau konstan
- d. Nilai koefisien regresi dari variabel pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan ( $b_3$ ) mempunyai nilai koefisien regresi negatif sebesar -0.453215 berarti bahwa apabila pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan berkurang sebesar 1 persen maka akan menurunkan Indeks pembangunan manusia sebesar 0.453215 dengan asumsi variabel lain yaitu pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan dianggap tetap atau konstan.

#### 4.3.2 Uji Statistik

Setelah hasil regresi berganda diketahui maka dilakukan pengujian statistik yaitu uji F, uji t dan uji  $R^2$ , untuk menginterpretasikan hasil analisis regresi linier berganda. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat secara signifikan, baik secara simultan maupun secara parsial. Hasil uji statistik sebagai berikut:

##### a. Uji F (Simultan)

Untuk menguji hubungan dari variabel bebas yaitu pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan dan sektor pendidikan secara bersama atau simultan terhadap variabel terikat yaitu Indeks Pembangunan manusia (Y) maka dilakukan Uji F. Apabila nilai probabilitas  $F_{hitung} < \alpha = 0,05$ , berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, maka artinya variabel pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan dan sektor pendidikan secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap Indeks pembangunan manusia Provinsi Jawa Timur.

Hasil analisis regresi linier berganda ( seperti terlihat dalam Tabel 4.7) diperoleh  $F_{hitung}$  sebesar 36.23706 dan prob.(F-statistik) sebesar 0.000024. Dari hasil regresi tersebut terbukti bahwa probabilitas  $F_{hitung}$  (0.000024) lebih kecil dari level signifikan  $\alpha = 5\%$ .  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang berarti variabel pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan dan sektor pendidikan secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan Indeks pembangunan manusia di Jawa Timur.

##### b. Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing koefisien regresi pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan dan sektor pendidikan di Provinsi Jawa Timur tahun 2001-2013 secara parsial. Uji t dilakukan dengan cara membandingkan tingkat probabilitas dari pertumbuhan ekonomi pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan dan sektor pendidikan dengan tingkat signifikansi  $t_{tabel}$  ( $\alpha = 5\%$ ). Jika tingkat probabilitas  $t_{hitung} < tingkat\ signifikan\ t_{tabel}$

maka pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan dan sektor pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur tahun 2001-2013, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8 Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	53.38692	2.092144	25.51780	0.0000
X1	0.851484	0.546334	1.558541	0.1535
X2	0.858250	0.199205	4.308381	0.0020
X3	-0.453215	0.153605	-2.950526	0.0162

Sumber : lampiran B

Berdasarkan tabel 4.8 maka pengujian hipotesis secara parsial untuk mengetahui Pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan dan sektor pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur sebagai berikut :

- a. Nilai  $t_{hitung}$  pertumbuhan ekonomi sebesar 1.558541 dengan tingkat probabilitas 0.1535; maka probabilitas  $t_{hitung}$  lebih besar dari tingkat signifikansi ( $\alpha = 5\%$ ), yang artinya bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur.
- b. Nilai  $t_{hitung}$  pengeluaran pemerintah sektor kesehatan sebesar 4.308381 dengan tingkat probabilitas 0.0020; maka probabilitas  $t_{hitung}$  lebih kecil dari tingkat signifikansi ( $\alpha = 5\%$ ), yang artinya bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur.
- c. Nilai  $t_{hitung}$  pengeluaran pemerintah sektor pendidikan sebesar -2.950526 dengan tingkat probabilitas 0.0162; maka probabilitas  $t_{hitung}$  lebih kecil dari tingkat signifikansi ( $\alpha = 5\%$ ), yang artinya bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur.

## c. Uji $R^2$

Analisis yang digunakan digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi sumbangan variabel bebas yaitu Pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan dan sektor pendidikan terhadap Indeks pembangunan manusia di Jawa Timur dengan menggunakan koefisien determinasi determinasi berganda ( $R^2$ ). Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Hasil regresi linier berganda (seperti terlihat dalam Tabel 4.8) menunjukkan pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan dan sektor pendidikan terhadap Indeks pembangunan manusia di Jawa Timur diperoleh nilai  $R^2$  sebesar 0.898056. Hal ini berarti menunjukkan pengaruh variabel bebas pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan dan pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia sebesar 89,8056%, sedangkan 10,1942% dipengaruhi oleh faktor lain dan kesalahan pengganggu (*error terms*) di luar variabel pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan dan pendidikan.

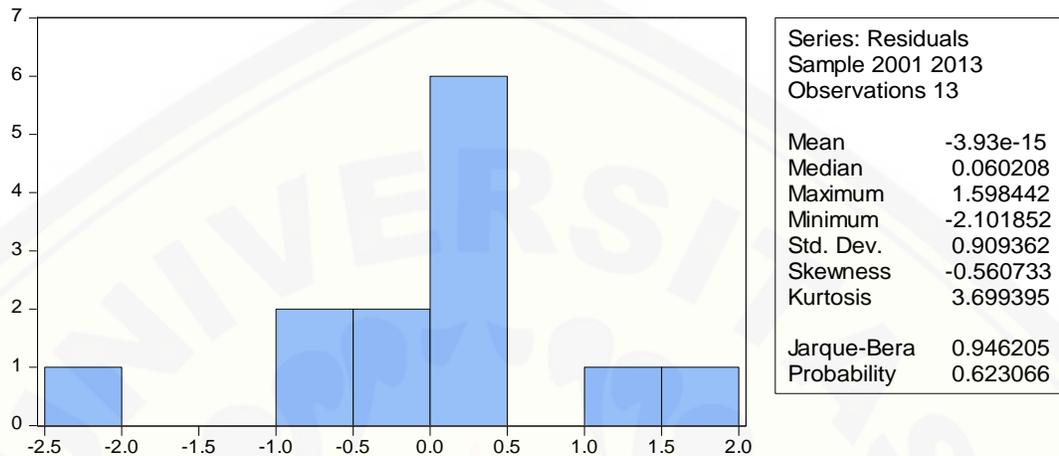
### 4.3.3 Uji Asumsi Klasik

Untuk mendapatkan persamaan regresi linear berganda yang memiliki nilai estimator yang baik maka persamaan regresi linear berganda tersebut harus memenuhi asumsi klasik regresi yaitu bebas dari multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas dan normalitas:

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengevaluasi apakah nilai residual dari model yang dibentuk sudah normal atau tidak. Pengujian uji normalitas

menggunakan pendekatan *Jarque-berra test*. Hasil pengujian J-B test dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut :



Gambar 4.4

Berdasarkan uji normalitas *Jarque-Bera*, dihasilkan nilai probabilitas hitung sebesar  $0,623066 >$  nilai probabilitas  $\chi^2$  ( $\alpha=5\%$ ). Hal ini menunjukkan bahwa model empiris telah berdistribusi normal.

## 2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi tersebut ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Gejala multikolinieritas dapat dideteksi dengan melihat nilai uji deteksi klein, uji ini dilakukan dengan melakukan regresi variabel bebas dengan variabel bebas lain. Hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas Model Auxiliary

Model Auxiliary 1

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.303978	1.207148	-0.251815	0.8063
X2	0.268186	0.078118	3.433068	0.0064
X3	-0.032273	0.088321	-0.365405	0.7224
R-squared	0.762856			

Sumber : Lampiran B

Model Auxiliary 2

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.848134	3.269349	0.565291	0.5843
X1	2.017217	0.587584	3.433068	0.0064
X3	0.497577	0.186279	2.671143	0.0234
R-squared	0.859755			

Sumber: Lampiran B

Model Auxiliary 3

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.186231	3.982657	1.302204	0.2220
X1	-0.408271	1.117309	-0.365405	0.7224
X2	0.836855	0.313295	2.671143	0.0234
R-squared	0.698488			

Sumber: Lampiran B

Berdasarkan deteksi multikolinearitas menggunakan metode *Klein*, dari Tabel 4.9 di atas diketahui tidak terdapat multikolinearitas dalam model. Hal ini ditunjukkan bahwa tidak ada korelasi berpasangan yang memiliki nilai tinggi di antara regresor yang melebihi 0,9. nilai  $R^2$  seluruh model auxiliary 0.762856, 0.859755, 0.698488. Dan metode *Klein* juga mengatakan jika nilai  $R^2$  seluruh model auxiliary lebih kecil daripada  $R^2$  keseluruhan yaitu 0.898056 maka model tersebut terbebas dari multikolinearitas.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah kesalahan pengganggu mempunyai varian yang sama dari masing-masing variabel bebas. Untuk mengetahui ada tidaknya

heteroskedastisitas dalam model regresi digunakan metode *white(white test)*, hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut:

Tabel 4.10 Hasil Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	0.962934	Prob. F(3,9)	0.4513
Obs*R-squared	3.158807	Prob. Chi-Square(3)	0.3678
Scaled explained SS	2.043421	Prob. Chi-Square(3)	0.5634

Sumber: Lampiran C

Berdasarkan Tabel 4.10 dihasilkan nilai probabilitas  $\chi^2$  hitung sebesar  $0.3678 >$  nilai probabilitas  $\alpha=5\%$ . Hal ini menunjukkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat permasalahan heteroskedastisitas

#### 4. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi ini menggunakan uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Teest*. Uji BG-LM test digunakan untuk mengidentifikasi masalah autokorelasi tidak hanya pada *first order* tetapi bisa juga digunakan pada *order* lainnya. Hasil pengujian BG-LM test dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut:

Tabel 4.11 Hasil Uji Autokorelai BG-LM test

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	0.325034	Prob. F(2,7)	0.7328
Obs*R-squared	1.104680	Prob. Chi-Square(2)	0.5756

Sumber: Lampiran D

Dari Tabel 4.11 dengan menggunakan Uji BG-LM test dihasilkan nilai probabilitas  $\chi^2$  hitung sebesar  $0.5756 >$  nilai probabilitas  $\alpha=5\%$ . Hal ini menunjukkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat permasalahan autokorelasi.

#### 4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai fokus sasaran aktivitas dengan seluruh kegiatan pembangunan yaitu

tercapainya penguasaan atas sumber daya manusia guna memperoleh pendapatan untuk mencapai hidup yang layak, peningkatan derajat kesehatan agar dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itulah faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia dapat diukur dari pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pendidikan

Indek Pembangunan Manusia adalah suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dari definisi yang diberikan UNDP tersebut mencerminkan bahwa manusia dalam suatu wilayah selayaknya memiliki dan diberikan pilihan-pilihan yang luas dan dibutuhkan dukungan dari pemerintah guna memberikan sarana bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan dan mengambil keputusan sesuai dengan pilihan yang diambil. Salah satu yang paling menentukan dalam suksesnya pembangunan manusia adalah pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan, sehingga dua sektor tersebut menjadi prioritas utama pemerintah guna mewujudkan pembangunan manusia yang akhirnya menjadi input dalam proses pembangunan di berbagai sektor. Nilai Indeks pembangunan manusia suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak. Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, semakin dekat jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran itu.

Dalam penelitian ini, Indeks Pembangunan Manusia dapat diartikan sebagai tolak ukur pembangunan manusia yang menempatkan manusia sebagai fokus sasaran aktivitas dengan seluruh kegiatan pembangunan yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya manusia guna memperoleh pendapatan untuk mencapai hidup yang layak, peningkatan derajat kesehatan agar dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Indeks pembangunan manusia di Jawa Timur yaitu pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan dan sektor pendidikan. Berdasarkan analisis regresi, selanjutnya dapat dibahas tentang pengaruh

Pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan dan sektor pendidikan terhadap Indeks pembangunan manusia di Jawa Timur tahun 2001-2013. Hasil penelitian ini hanya bisa digunakan dalam jangka pendek karena masih banyak perbaikan-perbaikan dalam analisis modelnya. Hasil estimasi pada tingkat first difference diperoleh nilai konstanta yang positif artinya, dengan adanya variabel Pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan dan sektor pendidikan maka akan terjadi peningkatan dalam indeks pembangunan manusia di Jawa Timur.

Dari hasil uji F, maka koefisien-koefisien dalam persamaan regresi linier berganda dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan dan sektor pendidikan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Indeks pembangunan di Jawa Timur. Dari hasil uji t menyatakan bahwa variabel pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan dan sektor pendidikan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Indeks pembangunan manusia di Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur.

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap Indeks pembangunan manusia di Jawa Timur. Hal ini dikarenakan pada pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur yang mengalami fluktuatif sehingga pada beberapa tahun terjadi penurunan yang sangat tajam dimana itu dampak dari penurunan dari di berbagai sektoral. Karena terjadi penurunan diberbagai sektoral ini maka mempengaruhi produktifitas tenaga kerja yang pada akhirnya mempengaruhi pendapatan dan meningkatkan kemiskinan sehingga berpengaruh terhadap pembangunan manusia yang terjadi di Jawa Timur. Pada tahun 2012 kenaikan pertumbuhan ekonomi hanya 0,05% dari tahun sebelumnya, namun keadaan perekonomian Jawa Timur pada tahun 2012 merupakan pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi sehingga banyak wacana yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur melebihi pertumbuhan ekonomi secara nasional (BPS, 2012). Jika dilihat dari antar wilayah di Jawa Timur, angka pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur kurang merata ada yang sebagian di

dominasi oleh sektor pertanian memiliki perekonomian yang sangat rendah namun di lain sisi wilayah yang di dominasi oleh sektor industri dan perdagangan memiliki angka perekonomian yang sangat tinggi. oleh karena itu hasil penelitian ini merupakan hasil yang signifikan dengan fenomena keadaan perekonomian pada tahun 2012. Menurut UNDP (1996) hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) kriteria, yaitu seimbang (*balanced*) dan tidak seimbang (*unbalanced*). Untuk yang seimbang dibedakan lagi antara kuat dan lemah. Kategori seimbang yang pertama, terjadi hubungan kuat (*strong link*) antara pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia. Sementara kategori seimbang yang kedua, berlangsung hubungan lemah (*weak link*) antar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Kategori tidak seimbang (*unbalanced link*) memiliki ciri pertumbuhan ekonomi relatif lambat tetapi pembangunan manusia relatif cepat atau sebaliknya (Brata, 2005:6). Dimana variabel Penelitian yang dilakukan berbagai pihak mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan namun ada juga yang menyatakan sebaliknya. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi tidak serta merta akan meningkatkan indeks pembangunan manusia sehingga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan indikator penting untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia di provinsi jawa timur pada tahun 2001-2013 mengingat pada pertumbuhan ekonomi di provinsi jawa timur pada tahun tersebut mengalami fluktuatif yang sangat tajam. Pada Seperti penelitian yang dilakukan oleh A. Wahid Bilal (2012) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi (PDRB) mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di makassar. Jadi setiap ada peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak serta merta meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan berpengaruh positif secara signifikan terhadap Indeks pembangunan manusia di Jawa Timur pada tahun 2001-2013. Hal ini berarti setiap peningkatan variabel pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur

pada tahun 2001-2013. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Tingkat kesehatan masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan yang secara tidak langsung akan berpengaruh juga pada tingkat kemiskinan Sementara itu tingkat kemiskinan akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan. Oleh karena itu kesehatan merupakan faktor utama kesejahteraan suatu masyarakat. Berdasarkan BPS Provinsi Jawa Timur yang tercantum pada tabel 1.3 dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh BPS RI dengan metode tidak langsung, rata-rata Angka Harapan Hidup di Jawa Timur selama empat tahun terakhir 2009-2012 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2009 69,15 dan meningkat menjadi 70,09 pada tahun 2012. Hal ini menandakan bahwa pelayanan kesehatan di Provinsi Jawa Timur mengalami perbaikan setiap tahunnya. Salah satu cara untuk meningkatkan angka harapan hidup adalah dengan membangun infrastruktur di provinsi Jawa Timur yang dekat dengan masyarakat bawah, dimana perbaikan kesehatan yang ditunjukkan melalui angka harapan hidup sangat penting untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja.. Hal ini sesuai dengan teori Human capital bahwa modal manusia berperan signifikan terhadap terhadap pembangunan manusia disuatu daerah atau negara. Hal ini sesuai dengan dengan teori dari hasil Setiawan (2006) kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya. Hal ini di dukung oleh penelitian dari Nasution (2010) bahwa dengan adanya peningkatan pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan akan meningkatkan indeks pembangunan manusia

Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2001-2013. Hal ini berarti setiap peningkatan variabel pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan menurunkan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur pada tahun 2001-2013. . Penelitian ini didukung dengan penelitian dari Ahayadi

Jusaeman(2014) bahwa anggaran pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan berpengaruh negatif terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten Soppeng. Penelitian ini tidak sesuai dengan teori human capital dengan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia bisa dengan menaikkan anggaran untuk pendidikan. Di Jawa Timur pada setelah tahun 2002 mengalami penurunan anggaran yang sangat drastis, meskipun pada tahun 2006 mengalami kenaikan. Tapi kenaikan itu tidak sangat berarti karena kenaikannya yang sangat berjalan lambat. Pendidikan di Jawa Timur bukan faktor secara global dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Menurut Teori Human Capital Pendidikan merupakan bentuk suatu investasi sumber daya manusia sama halnya dengan kesehatan. Tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap tingkat pembangunan manusia. Karena pendidikan merupakan salah satu komponen utama dalam lingkaran setan kemiskinan yang dimana apabila tingkat kemiskinan rendah maka pembangunan manusia akan meningkat. Menurut Mankiw (2008:48) pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia. Modal manusia dapat mengacu pada pendidikan, pendidikan adalah hal yang pokok untuk mencapai kehidupan yang layak yang pada akhirnya akan meningkatkan pembangunan manusia itu sendiri.

Di Jawa Timur Angka Melek Huruf penduduk usia 15 tahun keatas pada tabel 1.1 selama kurun waktu 2009-2012 mengalami peningkatan yang positif dari 87,80 % pada tahun 2009 menjadi 88,34% pada tahun 2012. Dimana untuk meningkatkan Angka Melek Huruf perlu dibangun infrastuktur yang mendukung dalam meningkatkan mutu pendidikan dan angka melek huruf di Jawa Timur. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro dan Smith, 2006 :22). Salah satu cara untuk meningkatkan pembangunan manusia dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan memperbaiki sistemnya. Tetapi yang terjadi di Jawa Timur sebaliknya, karena dana yang dipakai dalam pendidikan disini adalah dana yang hanya untuk menutupi kekurangan dari dana disetiap Kabupaten. Sehingga

penyebaran dan distribusi yang tidak merata, hanya Kabupaten yang kekurangan dana pendidikan diberi oleh Provinsi. Untuk anggaran pendidikan sendiri sudah di tangani setiap Kabupaten masing.-masing. Maka dari itu pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan berpengaruh negatif terhadap indeks pembanguna manusia. Karena ketidakmerataan dan ketimpangan pendapatan.



## **BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

1. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini berarti tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi tidak serta merta akan meningkatkan indeks pembangunan manusia di Jawa Timur
2. Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Peningkatan indeks pembangunan manusia di Jawa Timur dapat dilakukan melalui kebijakan yang mendorong peningkatan pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan.
3. Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan berpengaruh signifikan. Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan berpengaruh negatif dan tidak berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur.

### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan penarikan kesimpulan, maka penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan untuk dijadikan masukan dan pertimbangan, berikut saran-saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah:

1. Disarankan bagi pemerintah Jawa Timur lebih memperhatikan masalah pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi lebih ditingkatkan di segala sektor karena akan membuka peluang penggunaan faktor produksi terutama sumber daya manusia sehingga pertumbuhan ekonomi diimbangi dengan peningkatan pembangunan manusia yang tercermin dalam indeks pembangunan manusia di Jawa Timur
2. Disarankan agar perlunya pemerintah Jawa Timur memperhatikan masalah yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan yakni dengan menganggarkan budget yang lebih di sektor pendidikan karena merupakan sektor yang krusial untuk dapat memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia.

3. Disarankan agar perlunya pemerintah Jawa Timur memperhatikan masalah yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan yakni dengan terus mengadakan pembangunan sarana publik khususnya di bidang kesehatan, seperti pembangunan rumah sakit dan puskesmas. serta peningkatan kualitas gizi dan nutrisi untuk masyarakat miskin serta posyandu khususnya pada daerah pedesaan serta daerah tertinggal.
4. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian ulang dengan tema yang sama agar menambah jangka waktu dan mengubah atau menambah variabel-variabel penelitian yang mempunyai pengaruh terhadap tema penelitian sehingga akan banyak variasi hasil penelitian dengan tema yang sama. Dan pada akhirnya penelitian ini akan terus berkembang dan bermanfaat dengan lebih baik.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arsyad, Lincoln. 2004. *Pembangunan Ekonomi* (Edisi 4). Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi dan Nasional*, .  
Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2013. *E-book Statistik Gender Jawa Timur*  
Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2014. *Jawa Timur Dalam Angka 2014* .  
Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2014. *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi*. Badan  
Pusat Statistik
- BAPPENAS, UNDP. 2009. *Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah : Alat-alat  
Praktis dari Indonesia*. Jakarta : UNDP Indonesia
- Bilal, A.Wahid, 2012. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan  
Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Makassar periode  
1996-2010*. Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin. Makassar
- Boediono, 1999, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE UGM Yogyakarta
- Brata, Aloysius Gunadi, 2005. *Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan Manusia,  
dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian – Universitas Atma Jaya
- Brata, Aloysius Gunadi, 2005. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta,  
dan distribusi pendapatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia*.  
Yogyakarta: Lembaga Penelitian – Universitas Atma Jaya.
- Dajan, Anto. 1991. *Pengantar Metode Statistik*. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia
- Direktoral Jenderal Perimbangan dan Keuangan Republik Indonesia. 2014. Jakarta
- Dumairy, 1997. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Ghozali, I. 2001. *Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Edisi ke 2. Universitas  
Diponegoro.
- Gujarati, D. 1997. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta : PT. Erlangga.

- Gujarati, D. 2003. *Ekonometrika Dasar*. Zain Sumarno dan Zein [penerjemah]. Erlangga, Jakarta.
- Ilham,Irawan, 2009. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia*, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Jhingan,Ml,2000.*Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan .Edisis pertama*. Raja Grafindo Persada.Jakarta
- Lanjouw, P., M. Pradhan, F. Saadah, H. Sayed, R. Sparrow, 2001. *Poverty, Education and Health in Indonesia: Who Benefits from Public Spending?*.
- Mangkoesoebroto, Guritno, 1994. *Ekonomi Publik*. BPFE: Yogyakarta
- Mankiw,N. Gregory, 2008.. *Makro Ekonomi*. Erlangga : Jakarta
- Meier.G.M. dan J.E.Rauch.2000.*Leading Issue in Economics Development (seventh edition)*.NewYork-Oxford : Oxford University Press.
- Musgrave A.Richad,1993. *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek*. Erlangga : Jakarta
- Nasution, Abdul Aziz, 2010, *Analisis Dampak Realisasi APBD terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Binjai*, Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara
- Patta,Devianti, 2012, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan periode 2001-2010*.Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Santoso, Singgih. 2000. *SPSS Mengolah Data Statistik Secara Profesional*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Setiawan,Bhakti M.& Hakim,A,2006. *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia*. Universitas Islam Indonesia
- Singarimbun, N & Sofyan,E.1995. *Metode Penelitian Survei, Cetakan Kedua*. Penerbit Pustaka LP3ES : Jakarta.
- Sukirno, S. 2004. *Pengantar Teori Makroekonomi. Edisi Ketiga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Suparmoko,M.1994.*Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek*. BEFE UGM.Yogyakarta
- Suryana.2000.*Ekonomi Pembangunan*. Salemba Empat : Jakarta
- Tarigan, Robinson. 2004. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi edisi revisi*. PT. Bumi Aksara : Jakarta

- Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. 2004. *Pembangunan Ekonomi. Edisi ke-8*. Erlangga. Jakarta
- Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi. Edisi ke-9. Terjemahan oleh Haris Munandar dan Puji A.I.* Erlangga. Jakarta
- Ul Haq, Mahbub. *Human Development Report: The Human Development Concept*.
- Usmaliadianti, Christian, 2011. *Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah sektor pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Jawa Tengah tahun 2007-2009*. Skripsi Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro Semarang
- UNDP. 1990 – 2009. *Human Development Report*. UNDP (On-line)
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Widodo, Adi, 2011. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan IPM Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- World Bank Working Paper No. 2739. Washington D.C.: World Bank. Diakses dari: <http://papers.ssrn.com>

**LAMPIRAN A**

Hasil Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: IPM

Method: Least Squares

Date: 04/01/15 Time: 20:28

Sample: 2001 2013

Included observations: 13

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	53.38692	2.092144	25.51780	0.0000
X1	0.851484	0.546334	1.558541	0.1535
X2	0.858250	0.199205	4.308381	0.0020
X3	-0.453215	0.153605	-2.950526	0.0162
R-squared	0.923542	Mean dependent var	69.14154	
Adjusted R-squared	0.898056	S.D. dependent var	3.288702	
S.E. of regression	1.050041	Akaike info criterion	3.183196	
Sum squared resid	9.923279	Schwarz criterion	3.357026	
Log likelihood	-16.69077	Hannan-Quinn criter.	3.147466	
F-statistic	36.23706	Durbin-Watson stat	1.477322	
Prob(F-statistic)	0.000024			

**LAMPIRAN B**

Uji Multikolinearitas dengan Uji Klein

Dependent Variable: X1

Method: Least Squares

Date: 04/01/15 Time: 20:42

Sample: 2001 2013

Included observations: 13

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.303978	1.207148	-0.251815	0.8063
X2	0.268186	0.078118	3.433068	0.0064
X3	-0.032273	0.088321	-0.365405	0.7224
R-squared	0.762856	Mean dependent var	5.730000	
Adjusted R-squared	0.715427	S.D. dependent var	1.139335	
S.E. of regression	0.607782	Akaike info criterion	2.041174	
Sum squared resid	3.693993	Schwarz criterion	2.171547	
Log likelihood	-10.26763	Hannan-Quinn criter.	2.014377	
F-statistic	16.08423	Durbin-Watson stat	1.650682	
Prob(F-statistic)	0.000750			

Dependent Variable: X2  
 Method: Least Squares  
 Date: 04/01/15 Time: 20:43  
 Sample: 2001 2013  
 Included observations: 13

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.848134	3.269349	0.565291	0.5843
X1	2.017217	0.587584	3.433068	0.0064
X3	0.497577	0.186279	2.671143	0.0234
R-squared	0.859755	Mean dependent var	25.39974	
Adjusted R-squared	0.831706	S.D. dependent var	4.063232	
S.E. of regression	1.666888	Akaike info criterion	4.058968	
Sum squared resid	27.78515	Schwarz criterion	4.189341	
Log likelihood	-23.38329	Hannan-Quinn criter.	4.032170	
F-statistic	30.65182	Durbin-Watson stat	1.623965	
Prob(F-statistic)	0.000054			

Dependent Variable: X3  
 Method: Least Squares  
 Date: 04/01/15 Time: 20:43  
 Sample: 2001 2013  
 Included observations: 13

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.186231	3.982657	1.302204	0.2220
X1	-0.408271	1.117309	-0.365405	0.7224
X2	0.836855	0.313295	2.671143	0.0234
R-squared	0.698488	Mean dependent var	24.10273	
Adjusted R-squared	0.638186	S.D. dependent var	3.593837	
S.E. of regression	2.161730	Akaike info criterion	4.578869	
Sum squared resid	46.73075	Schwarz criterion	4.709242	
Log likelihood	-26.76265	Hannan-Quinn criter.	4.552071	
F-statistic	11.58309	Durbin-Watson stat	1.135895	
Prob(F-statistic)	0.002492			

**LAMPIRAN C**

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.962934	Prob. F(3,9)	0.4513
Obs*R-squared	3.158807	Prob. Chi-Square(3)	0.3678
Scaled explained SS	2.043421	Prob. Chi-Square(3)	0.5634

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 04/01/15 Time: 20:44

Sample: 2001 2013

Included observations: 13

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.009244	1.477717	-0.682975	0.5118
X1^2	-0.062127	0.057382	-1.082697	0.3071
X2^2	0.002770	0.005015	0.552254	0.5942
X3^2	0.003471	0.004043	0.858434	0.4129
R-squared	0.242985	Mean dependent var	0.763329	
Adjusted R-squared	-0.009353	S.D. dependent var	1.305347	
S.E. of regression	1.311438	Akaike info criterion	3.627785	
Sum squared resid	15.47882	Schwarz criterion	3.801616	
Log likelihood	-19.58060	Hannan-Quinn criter.	3.592055	
F-statistic	0.962934	Durbin-Watson stat	1.792128	
Prob(F-statistic)	0.451346			

**LAMPIRAN D**

Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.325034	Prob. F(2,7)	0.7328
Obs*R-squared	1.104680	Prob. Chi-Square(2)	0.5756

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 04/01/15 Time: 20:45

Sample: 2001 2013

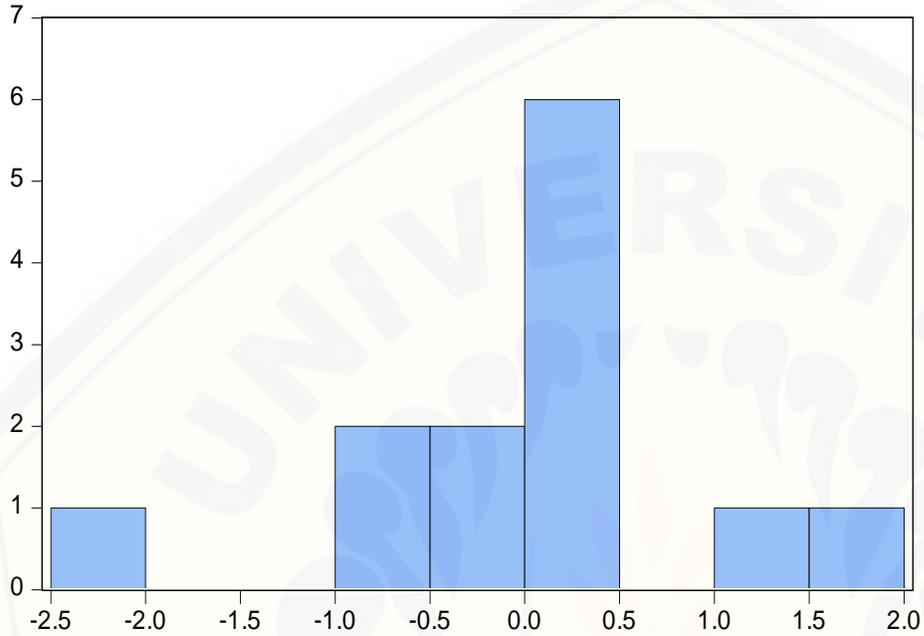
Included observations: 13

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.215983	2.286661	-0.094454	0.9274
X1	-0.160630	0.669003	-0.240103	0.8171
X2	-0.019199	0.225279	-0.085223	0.9345
X3	0.066808	0.186079	0.359032	0.7302
RESID(-1)	0.317051	0.436952	0.725596	0.4916
RESID(-2)	0.092370	0.463942	0.199098	0.8478
R-squared	0.084975	Mean dependent var	-3.93E-15	
Adjusted R-squared	-0.568614	S.D. dependent var	0.909362	
S.E. of regression	1.138925	Akaike info criterion	3.402084	
Sum squared resid	9.080045	Schwarz criterion	3.662830	
Log likelihood	-16.11354	Hannan-Quinn criter.	3.348489	
F-statistic	0.130013	Durbin-Watson stat	1.997245	
Prob(F-statistic)	0.980431			

**LAMPIRAN E**

Uji Normalitas



Series: Residuals	
Sample 2001 2013	
Observations 13	
Mean	-3.93e-15
Median	0.060208
Maximum	1.598442
Minimum	-2.101852
Std. Dev.	0.909362
Skewness	-0.560733
Kurtosis	3.699395
Jarque-Bera	0.946205
Probability	0.623066

## LAMPIRAN F

Analisis data yaitu pertumbuhan ekonomi., peneluaran pemerintah pada sektor kesehatan dan sektor pendidikan terhadap Indeks pembangunan manusia di Jawa Timur 2001-2013.

Tahun	IPM (Persen)	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (Rp)	Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (Rp)
2001	63.89	3.75	79.148.840.000	94.826.880.000
2002	64.10	3.80	103.417.760.000	117.382.050.000
2003	65.01	4.70	100.558.180.000	151.900.220.000
2004	66.85	5.83	323.602.979.640	434.718.765.061
2005	68.42	5.84	385.623.761.229	307.878.147.061
2006	69.18	5.80	555.161.393.854	293.196.764.010
2007	69.78	6.11	522.573.115.807	208.861.926.346
2008	70.38	5.94	719.097.518.012	220.848.745.698
2009	71.06	5.01	936.712.728.103	226.378.241.342
2010	71.62	6.68	1.621.346.728.808	258.566.115.961
2011	72.18	7.21	1.810.290.490.986	313.467.097.420
2012	72.83	7.27	2.071.695.071.828	415.736.190.069
2013	73.54	6.55	2.070.310.334.517	514.845.599.000

Sumber : BPS Jawa Timur, Direktorat Jenderal Perimbangan Dan Keuangan

Data analisis perubahan LN

Tahun	IPM	Pertumbuhan Ekonomi	LN Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan	LN Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan
2001	63.89	3.75	18.19	18.37
2002	64.10	3.80	18.45	18.58
2003	65.01	4.70	18.43	18.84
2004	66.85	5.83	26.50	26.80
2005	68.42	5.84	26.68	26.45
2006	69.18	5.80	27.04	26.40
2007	69.78	6.11	26.98	26.06

2008	70.38	5.94	27.30	26.12
2009	71.06	5.01	27.57	26.15
2010	71.62	6.68	28.11	26.28
2011	72.18	7.21	28.22	26.47
2012	72.83	7.27	28.36	26.75
2013	73.54	6.55	28.36	20.06

